

**KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

**(Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)**



**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Sosial Islam (S.Sos)

**Jurusan ilmu politik (IPOL)**

Oleh:

Hakim Baihaqi

1806016105

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
(Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)**

Skripsi

Diajukan kepada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Untuk memenuhi sebagai syarat

Guna mencapai gelar sarjana

Ilmu Sosial Islam

Oleh

Hakim Baihaqi

NIM. 1806016105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU POLITIK

Semarang

2022

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada.

Yth. Ibu dekan

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

UIN Walisongo Semarang

Di tempat

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Hakim Baihaqi

Nim : 1806016105

Jurusan : ilmu politik

Judul skripsi : konsep *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa (Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)

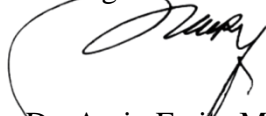
Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera di ujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Semarang, 9 juni 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. Amin Farin, M. Ag  
NIP. 197106142000031002

Bidang Metodologi & Tulisan



Rofiq, M.Si  
NIP. 197303052016011901

Tanggal : 15 Juni 2022

tanggal : 10 Juni 2022

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hakim Baihaqi  
Nim : 1806016105  
Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 26 Agustus 2000  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Semarang, 3 juni 2022

Yang membuat pernyataan



Hakim baihaqi

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KONSEP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA  
(Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)**

Disusun Oleh :

**Hakim Baihaqi**

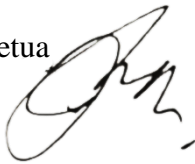
1806016105

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 29 Juli dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

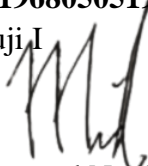
Ketua



Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A

**NIP. 19680505199503101002**

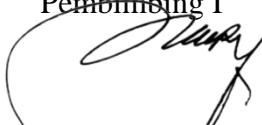
Penguji I



Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si

**NIP. 198505022019031007**


Pembimbing I



Dr. Amin farh, M. Ag

**NIP. 197106142000031002**

Sekretaris



Rofiq, M.Si

**NIP. 197303052016011901**

Penguji II



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

**NIP. 198409092019031007**

Pembimbing II



Rofiq, M.Si

**NIP. 197303052016011901**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi bapak dan ibu saya, bapak ikhwan dan ibu muskiroh yang telah memberikan segala hal yang tidak terbatas untuk kemajuan saya.

. Kepada Almamater UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat penulis menggali pengetahuan hingga tugas akhir ini dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban atas penelitian yang penulis lakukan.

*Allahummar hamna bil ilmi wa ridhoka ya rob... aamiin*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum wr. Wb.*

*Alhamdulillah wa syukurilah, asyhadu allailahailallah wa asyhaduanna muhammadarrasulullah, allahumma sholiala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina muhammad.*

Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul pelaksanaan *Good Governance* dalam politik pembangunan desa (studi kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan) kita ketahui bahwa skripsi merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana strata-1 di UIN Walisongo Semarang yang berbentuk karya ilmiah.

Penulis tentunya sebagai mahasiswa setelah 4 (empat) tahun lamanya menempuh studi di jurusan ilmu politik masih banyak keterbatasan keilmuan yang dimiliki, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini masih alakadarnya dan jauh dari kata sempurna. Harapan kecil penulis tentunya skripsi ini mampu membuka cara pandang baru untuk instansi pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Desa supaya terjalin pemerintahan yang sehat dalam melaksanakan pembangunan di unsur negara ter kecil dan tentunya dapat memberikan manfaat untuk kita semua *amin allahumma amin.*

Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan semangat dan alhamdulillah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelilmuan dan rizeki bagi penulis.

2. Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi inspirator kunci di berbagai lini kehidupan penulis.
3. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan segala hal untuk penyelesaian studi ini.
4. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Walisongo Semarang.
6. Nur Syamsudin M.Si., selaku kepala jurusan ilmu politik UIN Walisongo Semarang.
7. Dr. Amin Farih, M. Ag., selaku dosen pembimbing 1 penulis, yang telah memberikan banyak masukan dan transfer ilmu kepada penulis.
8. Rofiq, M.Si., selaku dosen pembimbing 2 penulis, yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi, serta memberikan saran yang luar biasa untuk penulis.
9. Dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan baru sampai penulis menyelesaikan program studi sarjana ilmu politik.
10. Seluruh staf *tendik* fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Sahabat-sahabati, sedulur, rekan dan kolega organisasi di dalam ataupun di luar kampus yang secara tidak langsung memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa untuk penulis.



12. Para senior yang telah mendidik penulis dengan segala yang dipunya agar adik-adiknya ini menjadi lebih baik dikemudian hari.
13. Teman-teman praktik pengalaman lapangan (PPL) serta pegawai di kantor balai Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dan teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan posko 5, yang sudah memberikan pengalaman baru untuk penulis.
14. Penulis juga ingin mengucapkan trimakasih yang mendalam kepada pemerintahan Desa Ngroto dimana tempat penulis melakukan penelitian dan sangat sabar memberikan arahan dan penjelasan akan apa yang penulis butuhkan selama penelitian berlangsung, kepada bapak warsin selaku kepala Desa, Kaur Perencanaan: Aris Ardiyanto, Kaur Tata Usaha Dan Umum : Ari Rahman Saputra, Kaur Keuangan: Fais Fahlevi, Kasi Pemerintahan : Sudiro, Kasi Kesejahteraan : Nur Kholipah, Kasi Pelayanan: Nur Rosyid, Kadus 1 M. Saiful Munir, Kadus 2 Dewi Utami, Dan Segenap Keorganisasian BPD dan juga Lembaga-Lembaga Lainnya Di Desa Ngroto.
15. Dan untuk teman-teman kelas Ilmu Politik C 2018 yang selama ini menemani belajar di kampus hingga menjadi keluarga besar kedua di tanah rantau yang tidakbisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Sesungguhnya apa yang saya raih, ada buah yang mereka tanamkan dan penulis meyakini mereka semua pasti mendapatkan manfaat dikemudian hari. Tentu saja masih banyak pihak yang belum disebutkan oleh penulis, jadi mohon maaf dan terima kasih banyak. Penulis juga secara khusus meminta maaf kepada seluruh pihak diatas karena pastinya tidak luput dari kesalahan.

“semua orang bisa melakukan dan menyelesaikan, tetapi hasilnya pasti berbeda-beda, sekian dan terima kasih”.

*Wassalamualaikum wr. Wb.*

## **MOTTO**

***“ SESEORANG YANG BERSABAR TIDAK AKAN PERNAH KEHILANGAN  
KESUKSESAN MESKIPUN MEMBUTUHKAN WAKTU YANG LAMA UNTUK  
MENCAPAINYA ”***

**“ALI BIN ABI THALIB”**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 prinsip dan dimensi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1. 2 aparat pemerintah Desa .....	35
Tabel 1. 3 keorganisasian bpd.....	36
Tabel 1. 4 daftar guru ngaji .....	40
Tabel 1. 5 daftar lembaga pendidikan .....	41
Tabel 1. 6 presentasi profesi.....	43
Tabel 1. 7 data pemeluk agama.....	44
Tabel 1. 8 komoditas pertanian .....	44
Tabel 1. 9 komoditas peternakan .....	45
Tabel 1. 10 sarana dan prasarana .....	48
Tabel 1. 11 lembaga kemasyarakatan Desa .....	51
Tabel 1. 12 bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.....	55
Tabel 1. 13 bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....	57
Tabel 1. 14 laporan perealisasiian pembangunan.....	59
Tabel 1. 15 bidang pembinaan kemasyarakatan .....	60
Tabel 1. 16 bidang pemberdayaan masyarakat .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 balai Desa Ngroto.....	31
Gambar 1. 2 peta Desa Ngroto.....	34
Gambar 1. 3 lahan pertanian .....	42
Gambar 1. 4 sumber daya alam.....	44
Gambar 1. 5 tradisi apitan .....	46
Gambar 1. 6 musholla miftahul huda.....	47
Gambar 1. 7 rapat pelaporan pertanggungjawaban pembangunan .....	76



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	1
BAB I .....	3
PENDAHULUAN .....	3
A. Latar belakang .....	3
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	8
E. Tinjauan pustaka .....	8
F. Metode penelitian .....	13
G. Sistematika penulisan skripsi .....	17
BAB II .....	19
TEORI GOOD GOVERNANCE .....	19
A. Pengertian good governance .....	19
B. Prinsip-prinsip good governance .....	20
BAB III .....	27
GAMBARAN UMUM SERTA LOKASI PENELITIAN .....	27
A. Gambaran umum materi penelitian .....	27
B. Gambaran umum Desa .....	31

BAB IV .....	53
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.....	53
A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa .....	55
B. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa .....	56
C. Bidang pembinaan kemasyarakatan.....	60
BAB V.....	70
ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DESA NGROTO.....	70
A. Aspek Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa.....	70
B. Banner infografi ApbDesa dan laporan pembangunan desa sebagai produk transparansi didesa Ngroto.....	73
C. Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.....	74
BAB VI.....	78
PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	84

## ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk merubah suatu keadaan menjadi lebih baik lagi, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang kuat akan membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian penerapan konsep *Good Governance* pada pembangunan yang dilaksanakan di Desa Ngroto. Konsep *Good Governance* menjadi salah satu opsi yang bagus untuk diterapkan pada instansi pemerintahan manapun, terlebih-lebih pada pemerintahan Desa untuk membangun Desa menjadi lebih sejahtera.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, lokasi berada di Desa Ngroto, untuk menggumpulkan data yang bersifat primer maupun sekunder, peneliti turut hadir melihat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan sebagai bentuk observasi serta melakukan wawancara bersama pemerintah desa dan elemen masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun dokumentasi. Peneliti menerapkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi metode, yang nantinya data akan di reduksi kemudian didisplay dan mendapatkan konklusi yang valid. Penelitian ini menggunakan teori *good governance* dengan tujuan untuk melihat permasalahan mengenai penerapan konsep tersebut dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur yang ada di desa ngroto kecamatan gubug kabupaten grobogan. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti berkaitan dengan bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastuktur yang terjadi serta bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang terpola dimasyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Ngroto dilihat dari sudut pandang *Good Governance* sudah cukup baik, prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pembangunan yang terlaksana sudah cukup baik, dilihat dari pengalokasian dana sudah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penyediaan infrastuktur yang layak, walaupun ter`kesan kurang partisipatif tetapi pemerintah desa sudah memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan. Pertanggungjawaban yang dilakukan juga menunjukkan hal-hal yang positif dan transparan.

**Kata kunci : pemerintah desa, pembangunan infrastuktur, *good governance***



## **ABSTARCK**

Development is a movement taken to change a situation for a better life. Development carried out by the government must meet the aspects of community welfare. A strong government will impact the lives of its community for the better. It is the background for the researcher to research the utilization of the Good Governance concept in the development implement in Desa Ngroto. The Good Governance concept is a valuable option to be applied to any government, instead of the village government, so that life in the countryside becomes more prosperous. This study is descriptive and uses a qualitative method with a case study approach. The research location is Desa Ngroto. Collecting primary and secondary data, the researcher was also present to observe the situation and conditions in the field as a form of observation, as well as conducting interviews with the village government and the community elements to obtain information and documentation. The researcher applies to check the validity of the data using the triangulation method, which will reduce the data and display it and get a valid conclusion. This study uses the concept of good governance to look at problems regarding the application of the conception in the infrastructure development implementation in Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. The issues related to how the planning process for the infrastructure development implementation occurs and how to apply the principles of accountability, transparency, and patterned participation in the community. Based on the point of view of the concept of Good Governance, the implementation of development in Desa Ngroto is quite good. The principles of accountability, transparency, and participation in development that have been implemented are acceptable. The allocation of funds has shown the government's seriousness in maximizing the provision of proper infrastructure. Although there is an assumption that it is not participatory, the village government has provided a forum for the community to share their aspirations in planning and implementing development. The accountability carried out also shows positive and transparent things.

***Keywords: village government, infrastructure development, good governance***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Infrastuktur menjadi hal yang penting bagi masyarakat untuk mempermudah mobilitas serta mengefektifitaskan kebutuhan dengan memaksimalkan fungsi dari sarana yang disiapkan untuk masyarakat. Pemerintah dalam hal ini menjadi pemegang otoritas pembangunan, untuk pemerintah desa sudah tertera dalam penjelasan UU No. 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa berhak membangun wilayahnya sendiri. Pembangunan memiliki banyak pengertian dari para ahli, tetapi pada umumnya pembangunan ialah proses merubah suatu kondisi menjadi lebih baik secara terencana. Pembangunan memiliki cakupan yang sangat luas meliputi budaya, politik, pendidikan, teknologi, infrastruktur, pertahanan serta kelembagaan. Pembangunan berdesarkan pendapat dari Ernawati ialah suatu orientasi perubahan yang mendasar untuk mencapai keadaan masyarakat yang makmur, adil serta sejahtera secara merata. Dalam pendapat yang lain diartikan sebagai proses multi dimensi yang mencakup proses reorganisasi, pembaharuan seluruh sistem, aktivitas ekonomi serta sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Purwaningsih 2008, 443).

Untuk itu pemerintah melakukan upaya pembangunan bersekala nasional yang mencakup seluruh wilayah yang ada di indonesia, dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu desa. Pembangunan dari bawah bertujuan untuk mendapatkan pemerataan di semua wilayah di indonesia. Desa adalah bagian penting di tatanan pemerintahan negara, Desa menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat (Zainudin 2016, 332). Dapat dipastikan semua program pembangunan dari pemerintah dapat tersalurkan serta terlaksana dengan tepat sasaran kembali kepada masyarakat.

Selaras dengan kaidah dalam agama islam yang memberikan pemahaman tentang penerapan pemerintahan yang sehat sehingga dapat menjalankan kebajikan untuk masyarakat pada umumnya. Pemerintahan berjalan sehat atau tidak dapat kita lihat dari kondisi masyarakatnya. Hendaknya pemimpin menjalankan kekuasaan seadil-adilnya, seperti penjelasan yang ada didalam surat *shod* ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (ص:26)

Artinya: "*hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*" (qs shad: 26).

Ayat ini menggambarkan seorang penguasa dalam hal ini pemerintahan untuk membuat kebijakan yang adil dengan tidak mengikuti atau memberatkan salah satu pihak dalam ayat diatas di tunjukkan sebagai menuruti hawa nafsu seorang penguasa. Sebagai gambaran dimasa sekarang adanya kebijakan-keijakan yang di buat hanya untuk memenuhi kebutuhan satu pihak dengan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya, tentunya hal ini tidak baik dilakukan oleh seorang pemimpin dalam ajaran islam. Baik itu pemerintahan ditingkat tertinggi hingga yang paling kecil dalam instansi pemerintahan desa.

Desa ngroto merupakan desa yang cukup luas dengan populasi penduduk mencapai 5 (lima) ribu jiwa, memiliki sumber daya alam berupa lahan persawahan serta ladang, sumber irigasi yang tersedia dari aliran kali

tuntut juga cukup besar. Infrastruktur yang terbangun dimanfaatkan warga masyarakat sesuai fungsi dan tujuannya, pembangunan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2021 menjadi fokus penulis untuk mengkaji lebih lanjut dari sudut pandang pemerintahan yang baik. Terdapat prinsip penting yang harus diterapkan dalam proses pembangunan desa ngroto diantaranya dalam penyusunan harus melibatkan elemen masyarakat untuk mengumpulkan aspirasi, kemudian prinsip akuntabilitas atau bertanggungjawab atas program yang di laksanakan juga menjadi syarat bagi pemerintah dikatan sebagai pemerintahan yang baik. Yang terakhir prinsip keterbukaan atau transparansi dengan dana dan proses yang dikelola selama pembangunan dilakukan, hal ini menjadi tuntutan bagi masyarakat kepada penyelenggara pembangunan dalam halini pemerintah desa.

Dalam catatan sejarah, desa menjadi titik awal adanya pemerintahan serta terciptanya masyarakat politik di indonesia (Ginting 2020, 44). Undang-undang tentang desa mengatur serta menjelaskan semua tentang desa salah satunya kewenangan desa untuk membangun wilayahnya sendiri. Hal ini termuat dalam bab iv pasal 18 bahwa kewenangan itu termasuk kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atas hak asal-usul serta adat desa.

Berbagai kebijakan telah dibuat untuk mengatur permasalahan Desa, seperti undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, kemudian di sambung secara teknis pada peratutan menteri dalam negeri (pemandagri) no. 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Dimana secara umum, pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kondisi desa yang mandiri, makmur serta sejahtera. Berdesar itu semua pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hihidup serta kesejahteraan masyarakat desa (Handayani 2014, 2).

Demi kelancaran pembangunan yang di canangkan pemerintah pusat, kepala desa menjadi tokoh penting dalam proses pembangunan yang dilakukan di wilayahnya sebagai penanggung jawab utama. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus berjalan dengan baik serta benar, untuk mencapai tujuan bersama serta mensejahterakan warga tentunya semua pihak dilibatkan dalam proses pembangunan. Tetapi faktanya masih banyak ditemukan kurang maksimalnya pembangunan di desa. Banyak faktor yang menyebabkan lambannya pembangunan yang terjadi seperti anggaran kondisi wilayah serta minimnya kesadaran serta partisipasi masyarakat (Kustiawan 2017).

Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan memiliki rangkaian kebijakan diantaranya Perbub No. 42 tahun 2010 berisikan peraturan perencanaan pembangunan, peraturan ini mengakar pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, diantara peraturan tersebut ialah pembentukan rencana pembangunan jangka menengah (rpjm Desa) serta rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa). Kewenangan serta kelembagaan desa juga di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Grobogan nomor 5 tahun 2015. Keuangan serta aset desa di atur dalam perda nomor 8 tahun 2016. Kota purwodadi sebagai ibu kota Kabupaten Grobogan dengan luas daerah kabupaten mencapai 1.975,86 km<sup>2</sup> dengan 273 Desa 7 kelurahan serta 19 kecamatan, pembangunan wilayah ini diharapkan dapat tersentuh dengan merata. Walaupun pada intinya pembangunan tidak bias lepas dari tiga aspek penentu yaitu manusia sebagai subyeknya, anggaran pembangunan nasional serta faktor alamiah (Ginting 2020, 2).

Dari penjelasan diatas, penulis menetapkan Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai lokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian mencoba melihat bagaimana proses pembangunan di Desa Ngroto Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan ditinjau dari konsep *Good Governance*. Penulis berfokus pada pembangunan infrastruktur pada tahun

2021. Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan adalah desa yang masih diklasifikasikan sebagai Desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya masih berpatok kepada matapencaharian di sektor primer yaitu bercocok tanam secara tradisional (Nurul Fitrah 2021, 339). Bercocok tanam tentunya memerlukan lahan serta akses jalan yang baik menuju lokasi pertanian, sedangkan masih didapati jalan-jalan menuju ladang serta sawah masyarakat yang dikategorikan kurang layak dikarenakan hanya timbunan tanah yang dicampur dengan batu. Persawahan berada di sebelah barat desa serta ladang warga berada di sebelah utara desa bersanding dengan bantaran sungai tuntang yang menjadi sumber pengairan ladang warga. Oleh karena hal tersebut, maka infrastruktur menjadi hal penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat di dalam bekerja. Melihat kondisi yang telah dipaparkan maka didalam program pembangunan Desa Ngroto pada tahun 2020 tentunya berfokus untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah desa bersama masyarakat menyusun program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Ngroto. Fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pemerintah Desa menjalankan proses politik pembangunan demi menunjang pembangunan Desa ditinjau dari konsep *Good Governance*. Penulis menetapkan judul untuk penelitian ini ialah “konsep *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa (Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)”

## **B. Rumusan masalah**

Untuk menggambarkan pertanyaan penelitian penulis menetapkan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana proses pembangunan infrastuktur desa Ngroto kecamatan gubug kabupaten grobogan?
2. Bagaimana prinsip transparansi akuntabilitas dan partisipasi dijalankan dalam proses pembangunan infrastuktur didesa Ngroto?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan infrastuktur yang dilakukan desa aNgroto dan bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi akuntabilitas dan transparansi didalamnya. Sehingga didapati kekurangan dan kelebihan yang menjadikan bahan evaluasi serta apresiasi untuk pemerintah desa.

### **D. Manfaat penelitian**

Dari penelitian yang di rencanakan harapannya penulis dapat memberikan kemanfaatan :

- a. Bagi dunia pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta bahan bacaan guna menjadi referensi bagi para pelaku pendidikan yang lain, terutama dalam kajian politik pembangunan Desa.
- b. Bagi masyarakat kiranya mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya posisi mereka untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.
- c. Bagi lembaga pemerintahan khususnya pemerintah Desa kecamatan gubug Kabupaten Grobogan di harapkan dapat meningkatkan pendidikan partisipasi politik khususnya dalam hal perencanaan pembangunan hingga pengimplementasiannya untuk mencapai pembangunan yang maksimal.

### **E. Tinjauan pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pembangunan desa maupun politik yang terdapat didalamnya. Dari berbagai penelitian sejenis penulis memetakannya menjadi 2 (dua), yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan penerapan *Good Governance* dalam pemerintah desa.

*Pertama*, pelaksanaan pembangunan desa. Kajian ini telah dilakukan oleh banyak ahli diantaranya, prasojo (2015), Sari (2020), Azizah (2017). Adapun penelitian yang dilakukan Risky Akbar Prasojo yang berjudul Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendiskripsikan fakta yang ada dilapangan. Dalam metode ini peneliti ialah instrumen kunci untuk menjelaskan kondisi objek penelitian secara alamiah. Menggunakan triangulasi untuk mendapatkan data yang akurat serta memberikan analisis secara induktif. Dari penelitian ini didapati bahwa hubungan antara pemerintah Desa dengan masyarakatnya bersifat mutualistik. Saling kerja sama antara keduanya menghasilkan pembangunan yang dapat di rasakan semua pihak (Prasojo 2015). Penelitian diatas memiliki focus kepada peran yang dilakukan pemerintah-masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara serta aparat untuk membagan wilayahnya dengan menggunakan landesan undang-undang yang sudah di tetapkan pemerintah pusat maupun daerah serta memanfaatkan hak otonomi Desa dalam pembangunan. Berbeda dengan penelitian yang akan penuli lakukan yaitu penulis mencoba memasukkan analisis terkait penyusunan anggaran pendapatan serta belanja Desa (APBDesa).

Studi lain dilakukan oleh Wilda Sari yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Disusun menggunakan jenis penelitian kulaitatif dengan pendekatan fenomenologi, guna menyuguhkan data-data yang ditemukan dilapangan secara objektif. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara terhadap sejumlah informan untuk mengumpulkan data primer sehingga analisis yang dilakukan tersusun secara interaktif. Penelitian ini menggambarkan kinerja kepala Desa sebagai pemimpin



pemerintahan untuk mengatasi infrastuktur jalan sudah cukup baik serta perlunya peningkatan kinerja yang berkelanjutan agar pembangunan mendapat hasil yang maksimal (Sari 2020). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, finansial yang baik untuk melakukan pembangunan, serta juga regulasi yang baik untuk mengatur proses pembangunan adalah faktor pendukung dalam proses pembangunan di Desa kariango. Hambatan yang muncul di golongkan menjadi dua yaitu ekstrernal serta internal. Internal dari pemerintah Desa belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan, sedangkan eksternal muncul dari alam seperti cuaca serta medan yang berat sehingga menambah lamanya pambangunan, harga matreal pembangunan yang semakin mahal juga menjadi faktor lambannya pembangunan. Penelitian diatas memiliki focus kepada tokoh yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan yaitu kepala Desa kariango sehingga dapat dikategorikan penelitian diatas adalah studi tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa, sehingga berbeda dengan apa yang akan penulis teliti yaitu hasil analisisa terhadap proses yang dilakukan dalam penyusun perencanaan pembangunan oleh pemerintah Desa serta kepartisipasian masyarakatnya.

Adapun penelitian rosfa nur azizah dalam skripsinya yang berjudul strategi optimalisasi pembangunan infrastuktur Desa melalui program pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bertempat di Desa candimas kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara dengan metode penelitian kualitatif serta kepustakaan, menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya kurangnya kepedulian masyarakat sehingga perealisasiian program pembangunan tidak semua terlaksana, hal ini terlihat dari banyaknya perencanaan yang di agendakan hanya program pembangunan jalan lapen saja yang terealisasi secara optimal. Sedangkan lima diantaranya tidak terpenuhi secara penuh. Adapula pembangunan

yang tidak terealisasi secara optimal yaitu pengeboran sumur untuk kebutuhan air bersih warga, talut penahan tanah, drainase perkampungan, gorong-gorong serta rabat beton disepanjang jalan utama, ini di karenakan adanya ketidak sinkronan antara anggaran yang direncanakan oleh aparaturnya Desa dengan ketentuan yang di berlakukan oleh lkkp. Dari sudut pandang islam pembangunan menjadi hal yang penting dilakukan karena memiliki nilai kemaslahatan baik di bidang ekonomi maupun sosial bagi masyarakat (Azizah 2017). Penelitian diatas memberikan perspektif keislaman dalam menilai strategi yang dilakukan dalam proses pembangunan infrastuktur Desa melalui pemberdayaan masyarakat, analisis yang digunakan juga menggunakan analisis perencanaan strategi sebelum pelaksanaan pembannungan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah memasukkan analisis hambatan serta dampak dari hambatan tersebut sehingga memberikan rangkaian solusi yang dijadikan alternative dalam pembangunan tahun berikutnya.

Dari studi tema pembangunan desa diatas dapat disimpulkan bahwa penulis berfokus pada pembangunan infrastuktur yang direncanakan serta dipertanggungjawabkan pada tahun 2021 oleh pemerintah desa Ngroto. Alur perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya pada masyarakat.

**Dua**, tinjauan Good Governance dalam pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh kabul setio utomo, sudarmo, dan didik G. Suharto yang berfokus pada analisis good governance dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa akuntabilitas transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam ( Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.

Studi lainnya dilakukan oleh ahmad fajar rahmatullah dan ahmad farhan rahmatullah, penelitian ini berfokus pada Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, menyimpulkan bahwa Implementasi *Good Governance* pada konteks transparansi tercermin pada bagaimana pemerintahan desa melakukan pemasangan papan informasi publik desa tahun berjalan, keterlibatan warga desa melalui aktivitas padat karya tunai (pkt, & kiprah tim pelaksana dipilih menurut forum-forum yang bisa diandalkan. Sementara buat adanya sinergitas antara bpd bersama warga desa. Dalam hal pertanggungjawaban selalu melakukan konsultasi menggunakan pihak-pihak yang terkait pada penggunaan pelaksanaan sistem keuangan desa

(siskeudes). Akuntabilitas tercermin pada laporan yang sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan pada hal partisipasi dana desa pada desa teluk majelis pada proses daya tanggap tim pelaksanaan terkait perencanaan pembangunan dana desa khususnya pada desa teluk majelis tinggal melaksanakan sesuai Juknis atau RAB yang sudah ditetapkan.

Dari studi tema good governance dalam pemerintah desa diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti berfokus dalam mengeksplorasi peranan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam hal ini pemerintah desa Ngroto beserta masyarakatnya dalam menjalankan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021.

#### **F. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif untuk mengungkap topik yang perlu di eksplorasi mendalam kepada masyarakat Desa, tokoh, hingga pemimpin dalam pemerintahannya. Emzir mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang bersifat interpretatif dari satu kondisi wilayah yang bersumber dari kepercayaan. Penelitian kualitatif juga sebuah nilai dari seorang peneliti yang terbangun dari data di lapangan, serta menjadikannya kesimpulan utuh yang menjadi hasil dari penelitian. Disini peneliti menjadi instrumen penelitian, hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mendapat interpretasi terhadap objek kajian yang akan diteliti, yakni pelaksanaan Good Governance dalam politik pembangunan Desa (studi kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan).

Menggunakan metode studi kasus untuk menyelidiki serta memahami suatu kejadian ataupun masalah yang timbul dari berbagai jenis informasi yang dianalisis sehingga dapat ditemukan solusi untuk

memecahkan masalah yang muncul. (Creswell 2010). Pembahasan dalam penelitian ini ialah perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Di tahun 2020 ini, peneliti akan menggali informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemantauan hingga hasil akhir serta manfaat yang diperoleh melaluinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun masyarakat Desa untuk kemanfaatan bersama. Informasi penelitian yang dimaksud diantaranya kinerja pemerintah Desa dalam penyusunan kebijakan, pendanaan program pembangunan, faktor penghambat serta pendukung serta lain sebagainya.

#### 1. Data serta sumber

Data adalah segala bentuk temuan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan penelitian menjadi tolak ukur sebuah informasi dapat dikatakan sebagai data penelitian ataupun tidak (Moleong 2004, 26). Serta yang menjadi subjek darimana data-data itu diperoleh dinamakan sumber data (Arikunto 2002, 28). Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:

##### a. Sumber data primer

Data primer ialah data utama yang diambil secara langsung dari objek yang diteliti bisa berupa hasil wawancara survei serta observasi (Azwar 2007, 91). Sumber data primer dalam penelitian ini ada di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, terdiri dari pemerintah Desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Ngroto.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai objek pengambilan data yang diambil dari bahan pendukung bukan dari sumber utama (Haryanto 1998, 11). Dalam hal ini berupa arsip-arsip resmi serta

data dokumen contohnya buku-buku, artikel, jurnal, file-file komputer serta bahan kepustakaan lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

## 2. Metode pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui garis besar permasalahan atas objek penelitian, data ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sistematis serta selektif yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kelanjutan dari penelitian tersebut. Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, peneliti akan mengamati kondisi serta menjadikannya data penelitian (Widi 2010, 236-237).

Soewadi menjelaskan observasi biasanya digunakan untuk memulai sebuah penelitian, seorang peneliti akan mengobservasi sebuah kasus terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi-informasi yang digunakan untuk melanjutkan kepenelitian yang sesungguhnya, seperti penelitian yang menggunakan metode survey biasanya diawali dengan observasi terlebih dahulu (Soewadji 2012, 23). Hal yang sama dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### b. Wawancara

Soewadji mengartikannya sebagai salah satu cara pengumpulan data secara langsung dilakukan oleh peneliti *face to face* dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi data dari informan. Dari berbagai jenis wawancara peneliti menggunakan jenis bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh seseorang terhadap narasumbernya yang mana narasumber boleh menjawab secara bebas atas garis besar pertanyaan pertanyaan yang dibawakan oleh pewawancara.

Dengan metode seperti ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber ialah masyarakat Desa Ngroto serta aparat Desa yang bertanggung jawab atas penanganan pembangunan Desa.

c. Dokumentasi

Pemahaman dokumentasi sebagai pencarian data penelitian yang bersumber dari catatan, foto, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda serta lainnya (Arikunto 2002, 206). Dalam penelitian ini penulis juga melakukan hal tersebut untuk mencari informasi serta data penelitian melalui dokumen yang tersimpan didalam laporan-laporan pembangunan Desa Ngroto tahun yang dimaksud.

3. Uji keabsahan data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk memeriksa data yang didapat dari hasil wawancara menggunakan hasil dari observasi dan hasil dari dokumentasi., sehingga didapatkan data penelitian yang matang serta valid sebelum masuk kedalam proses analisis (Moleong 2004, 330). Empat macam model triangulasi berdesarkan pendapat dari denzim diantaranya triangulasi sumber, metode, serta triangulasi teori, namun pada penelitian ini hanya digunakan triangulasi jenis metode serta sumber.

Triangulasi sumber berarti membandingkan serta mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang di peroleh dari satu sumber, dalam hal ini data sprimer dan data sekunder. Sedangkan Triangulasi metode artinya membandingkan serta mengecek kembali kebenaran dari tiga metode yang berbeda, seperti halnya membandingkan hasil data yang di peroleh dari metode wawancara, observasi serta dokumentasi untuk

melihat temuan yang sama. Jika didapati hasil yang sama maka kebenaran data dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Teknik analisis data

Temuan data yang diperoleh diurutkan serta dikelompokkan dengan sesuai, kemudian memberi tanda ataupun kode untuk mengkategorikannya sebagai langkah analisis sehingga didapatkan kesimpulan yang mengarah pada masalah yang di tuju. Disisilain widi memberikan pemahaman bahwa proses analisis data ialah proses pengumpulan serta pemodelan informasi data penelitian untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, memberikan saran serta kesimpulan sserta mendukung dalam pembuatan keputusan (Gunawan 2015, 209).

Ada tiga tahapan analisis yang penulis lakukan diantaranya : *reduksi data*, yaitu hasil rangkuman data-data penelitian. *Display data*, yaitu penyajian data kedalam narasi penjelasan yang penggambaran kondisi permasalahan penelitian. *Konklusi* serta *verifikasi*, merumuskan kesimpulan serta mem-verifikasi kembali yang merujuk pada bukti-bukti penelitian sehingga data yang diperoleh valid serta kredibel (Sugiyono 2014, 92-99).

### **G. Sistematika penulisan skripsi**

Dalam penyusunan hasil penelitian, peneliti membagi menjadi enam bab yang masing masing bab memiliki inti pembahasan yang saling mendukung sehingga menjadi satu kesatuan karya yang dapat dipahami ;

Bab i, bagian ini memuat pendahuluan yang menjadi pembuka dari pembahasan penelitian ini. Terdapat beberapa poin didalamnya diantaranya; latar belakang berisi penjelasan singkat tentang masalah yang



melatar belakangi penelitian. Rumusan masalah, yang berisi kumpulan pertanyaan penelitian yang menjadi bahasan dalam penelitian. Tujuan serta manfaat penelitian, yang berisi ungkapan harapan dari peneliti atas hasil akhir penelitian. Tinjauan pustaka, yang berisi kumpulan dari bahan bacaan penelitian ataupun kajian sejenis yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian serta metodologi penelitian.

Bab ii berisi landasan teori penelitian tentang konsep good governance pada pelaksanaan pembangunan desa. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang tidak bisa dipisahkan dengan unsur politik didalamnya.

Bab iii bagian ini memuat gambaran umum objek penelitian, untuk memperjelas situasi serta kondisi wilayah. Penulis mencoba menguraikan beberapa poin diantaranya; kondisi Desa Ngroto, letak geografis, kondisi pemerintahan Desa, kebijakan pembangunan Desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bab iv, bagian ini menyajikan hasil analisis yang dilakukan atas data yang didapatkan dari objek penelitian, berupa penyajian hasil analisis politik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Bab v, bagian yang menyajikan data serta analisis terkait rumusan masalah kedua yaitu implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Ngroto kecamatan gubug kabupaten grobogan.

Bab vi, bagian ini menjadi penutup dari penelitian yang disajikan, berisikan kesimpulan serta kritik saran untuk yang lebih baik kedepannya, serta kata penutup.

## BAB II

### TEORI GOOD GOVERNANCE

#### A. Pengertian good governance

Governance diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan mekanisme pemerintahan, mengatur dan memecahkan permasalahan publik. dalam konsep ini pemerintah bukan satu-satunya aktor yang menentukan, pemahaman bahwa pemerintah memiliki peran yang mengimplementasikan tugas membangun maupun memberikan jasa pelayanan serta infrastruktur akan berubah mejadi bahan pendorong terbentuknya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance memiliki pemaknaan yang berbeda pada peran negara, dan ini berarti adanya pemaknaan yang berbeda terhadap peran warga. Adanya tanggungjawab yang lebih besar pada warga, salahsatunya memberikan fokus pengawasan pada akuntabilitas pemerintah yang berkuasa. (Hetifa 2003, 1-2)

Mengakar pada pengertian good governance yang dipahami sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab dan memiliki prinsip yang linier dengan prinsip demokrasi yang efisien, menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara kebijakan maupun administratif, penganggaran dilakukan secara disiplin serta membangun *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Pada kenyataannya, selama ini pelaksanaan birokrasi di wilayah yang jauh dari pusat dianggap tidak kompeten . dalam situasi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan dalam mengimplementasikan desentralisasi. Dalam tanggung jawab yang lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi governance yang bersih dan transparan.

## **B. Prinsip-prinsip good governance**

Good governance menjadi cerminan kebijakan sosial dan politik demi kebaikan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok saja. Kunci utama untuk memahami konsep ini adalah dengan memahami prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Dari prinsip inilah kita akan mendapat tolak ukur kinerja pemerintahan yang baik. Penilaian baik buruknya kinerja pemerintahan ini bisa dinilai jika telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip yang ada didalam konsep god governance. Adapun prinsip-prinsip itu adalah:

1. Partisipasi, dipahami sebagai kesetaraan suara dari masyarakat dalam keterlibatannya untuk membuat kebijakan.
2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder dalam mengelola lembaga terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Mampu menjadi penengah dalam permasalahan perbedaan kepentingan diantara masyarakat, supaya tercipta konsensus bersama.
4. Akuntabilitas, dapat dipahami sebagai kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.
5. Transparansi, dapat dipahami sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.
6. Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.
7. Memiliki visi yang luas dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi.
8. Kesetaraan dan kewajaran, dapat kita pahami sebagai perlakuan yang adil bagi masyarakat, meningkatkan taraf hidup dengan terpenuhinya hak-hak berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Prinsip diatas merupakan penjelasan yang dikemukakan oleh UN development program (UNDP). Dalam penjelasan yang lain dan umum disebutkan dalam konsep good governance sebagai berikut

1. Prinsip transparansi

Prinsip yang pertama adalah prinsip transparansi. Dalam prinsip ini disebutkan bahwa dalam good governance diciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui ketersediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi ini dibangun dengan arus informasi yang bebas. Seluruh proses di pemerintahan dan lembaga-lembaga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak hanya itu, informasi tersebut juga disajikan dengan memadai supaya mudah dimengerti dan diawasi.

Memfasilitasi akses informasi ini sangat penting karena selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komponen dalam transparansi ini termasuk informasi yang komprehensif, tepat waktu serta memastikan informasi tersebut sampai ke kelompok masyarakat yang rentan. Artinya, pemerintah berusaha menyediakan informasi mengenai proses pemerintahan ke semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.

2. Prinsip partisipasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan adanya prinsip transparansi maka pemerintah bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membuat setiap warga masyarakat terdorong untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat yang selanjutnya akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan, terutama keputusan terkait kepentingan masyarakat umum, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Sebagai contohnya adalah contoh demokrasi langsung dan tidak langsung.

Dalam prinsip partisipasi terdapat keterlibatan para stakeholder atau pemegang kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Beragam saran dan masukan akan diterima sehingga para pembuat kebijakan bisa mempertimbangkan beragam persoalan, kepentingan, sudut pandang, serta opsi-opsi alternatif ketika akan menyelesaikan suatu persoalan. Dengan adanya prinsip partisipasi, terbuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi baru dan mengintegrasikan harapan masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan.

Tidak hanya itu, potensi terjadinya konflik sosial juga bisa diminimalisir. Untuk memastikan prinsip ini dapat dilaksanakan, maka perlu untuk disediakan ruang formal untuk berpartisipasi, baik berupa forum-forum yang relevan, mekanisme yang memadai untuk partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, serta adanya kepastian bahwa masukan dari publik akan diakomodir dalam penyusunan kebijakan. Hal ini untuk memastikan munculnya sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di masyarakat. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat.

### 3. Prinsip pengawasan

Prinsip selanjutnya yang tidak kalah penting adalah prinsip pengawasan. Dalam prinsip ini dibutuhkan peningkatan upaya pengawasan terhadap para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan negara. Adapun yang mengawasi adalah pihak swasta dan masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu saja. Hal inilah yang menjadi fungsi pengawasan DPRD sebagai wakil dari rakyat.

#### 4. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah mekanisme tanggung-gugat antara penyelenggara negara atau pembuat kebijakan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mekanisme ini tercipta kesempatan untuk pemangku kepentingan untuk bisa meminta pertanggungjawaban jika ada hal-hal yang tidak sesuai konsensus yang telah dibicarakan. Dengan prinsip akuntabilitas ini, para pembuat kebijakan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi yang mewakili rakyat bertanggung jawab kepada masyarakat dan semua lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawabannya pun tergantung pada jenis organisasi yang terkait.

#### 5. Prinsip daya tanggap

Dengan banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan prinsip daya tanggap untuk memastikan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan berusaha melayani pihak-pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Dalam prinsip good governance yang satu ini, penyelenggara pemerintahan diharapkan berusaha semaksimal mungkin dalam menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya sebuah konsensus yang menyeluruh dan terbaik untuk seluruh kelompok masyarakat.

#### 6. Prinsip profesionalitas

Prinsip good governance selanjutnya adalah prinsip profesionalisme. Prinsip ini artinya penyelenggara pemerintahan harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan moralnya. Hal ini dilakukan demi bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau semua kalangan.

#### 7. Prinsip efisiensi dan efektifitas

Segala proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk bisa membuahkan hasil sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah juga harus bisa menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

8. Prinsip kesetaraan

Dalam prinsip kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Setiap warga mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam memperbaiki ataupun mempertahankan kesejahteraan mereka.

9. Prinsip wawasan kedepan

Prinsip selanjutnya adalah prinsip wawasan ke depan. Prinsip ini mengungkapkan bahwa pemimpin dan seluruh masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus memahami kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial di sekitarnya yang mendasari sudut pandang mereka.

Selanjutnya, pemerintah dan seluruh warga masyarakat juga harus peka tentang apa-apa yang dibutuhkan untuk bisa merealisasikan perkembangan tersebut. Dengan prinsip wawasan ke depan, pembangunan daerah akan didasarkan pada visi dan strategi yang jelas. Seluruh warga pun akan ikut serta dalam proses pembangunan sehingga seluruh warga merasa berperan dalam dalam perwujudan pembangunan daerahnya.

10. Prinsip penegakan hukum

Prinsip terakhir yang dibahas dalam prinsip good governance ini adalah prinsip penegakan hukum. Dengan prinsip ini akan didorong perwujudan dari penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa

pengecualian. Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat juga diperhatikan. Asas hukum tata negara dan kerangka hukum yang dibuat juga harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.

#### C. Tujuan good governance

Pemerintah telah membuat pedoman umum reformasi birokrasi menteri negara pendayaguna aparatur negara, good governance memiliki tujuan diantaranya:

1. Birokrasi yang bekerja secara bersih sesuai dengan koridor nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyelewengan seperti
2. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif dan produktif sehingga mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat.
3. Birokrasi yang bekerja transparan (terbuka), namun tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab.

#### D. Ciri-ciri good governance

1. Sumber daya yang tersedia mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Adanya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.
3. Adanya keharusan secara transparan dalam menyediakan informasi.
4. Menerima setiap keluhan dan masukan dari masyarakat serta memiliki ketanggapan yang tinggi dalam melayani.
5. Memiliki visi yang strategis dalam menerapkan good governance.



6. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang dinilai tidak berkecukupan dan paling lemah dalam memenuhi kepentingan masyarakat tersebut.

E. Manfaat good governance

1. Tumbuhnya hubungan timbal balik dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat global yang baik.
2. Dapat meningkatkan partisipasi warga negara untuk dapat mengambil keputusan dalam kebijakan politik.
3. Administrasi menjadi lebih kompeten.
4. Sistem keuangan negara bisa menjadi lebih baik, transparan dan kuat.
5. Dapat mengikat rasa tanggung jawab sosial dan moral di masyarakat sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
6. Kebijakan hukum pada tingkat daerah maupun pusat dapat lebih terjamin konsistensi dan kepastiannya.
7. Hilangnya peraturan dan tindakan yang bersifat diskriminatif di berbagai elemen masyarakat.
8. Segala bentuk kebijakan pemerintah akan lebih dipercaya dan diterapkan karena terciptanya kesinambungan dalam pengelolaan pemerintahan.
9. Sistem pemerintahan yang lebih kondusif akan tercipta karena pelaksanaan yang transparan, efisien, bersih, akuntabel dan efektif.
10. Kebijakan ekonomi, politik dan sosial dapat dijalankan lebih maksimal.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM SERTA LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran umum materi penelitian

Alasan kenapa konsep Good Governance dianggap menjadi alternatif dari pada *Good Governace* ialah:

Pertama, adanya elemen global ataupun internasional dalam konsep *Good Governance*, sehingga dianggap lebih komprehensif (Sadikin 2017).

Kedua, *Good Governance* melibatkan sifat teknis serta intelektual tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu menyajikan keseimbangan pemerintahan yang agak bias serta juga mempertimbangkan sifat sistem pemerintahan yang dapat menjadi hambatan ataupun konflik dengan struktur kekuasaan dominan sistem kolonial global (Kamaluddin 2019, 222). Dengan kata lain, pemerintahan serta pemerintahan dapat menjadi kuat ketika sistem nilai bertentangan dengan kepentingan asing, imperialis, serta prinsip ataupun karakteristik intervensionis lainnya.

Ketiga, konsep *Good Governance* memiliki semua ciri pemerintahan yang baik yang lebih unggul dari *Good Governance* serta kuat secara teknis, profesional, organisasi, administrasi, politik, demokrasi, serta ekonomi. Demokratis, bertanggung jawab, serta akuntabel; serta nilai-nilai budaya tertanam dalam norma serta struktur sosial (Rendra Setyadiharja 2017, 92).

Keempat, Good Governance sejalan dengan standar konstitusional serta bertanggung jawab terhadap aturan serta prinsip otoritas internasional. Tata pemerintahan yang baik telah dipuji oleh para pendukungnya karena mengabaikan sifat konstitusional negara-bangsa serta pentingnya otonomi pemerintah.

Kelima, konsep *Good Governance* memiliki sejarah peninggalan kerajaan persia dengan sistem administrasi dengan efisiensi serta efektifitas yang tinggi. Berdasarkan pendapat dari raja darius, penerus raja cyrus, tidak ada negara yang dapat bertahan serta berkembang tanpa ekonomi yang kuat, pemerintahan yang kuat, serta administrasi yang kuat. Sebaiknya. Kebijakan organisasi efektif tidak hanya dalam menyelesaikan masalah negara serta wilayahnya, tetapi juga dalam pengawasan politik, tetapi juga dalam menanggapi krisis serta keadaan darurat yang tidak terduga. Ini memiliki potensi untuk mencakup seluruh dunia.

Meskipun konsep lama pemerintahan yang baik kurang demokratis menurut standar saat ini, adopsi serta perubahan struktural besar di bidang keuangan, pemerintahan, komunikasi, hukum serta pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip toleransi ialah salah satu konsep baru. Saat ini, konsep *Good Governance* melampaui keseluruhan konsep good governance dengan memasukkan lima dimensi dasar serta empat elemen interaksi. Sebelum terlibat dengan dimensi, elemen, ataupun fitur ini, definisi membantu menjaga konsep ini tetap dalam perspektif.

Istilah pemerintahan yang digunakan dalam penelitian ini menawarkan gagasan ataupun konsep pemerintahan serta administrasi yang lebih luas serta komprehensif daripada istilah government serta governance. Pemerintahan di sini berarti praktik pemerintahan partisipatif dalam aspek sosial, ekonomi serta politik suatu negara, ataupun pemerintah daerah melalui struktur serta nilai-nilai yang mencerminkan masyarakat. Termasuk negara-negara yang telah mengaktifkan lembaga kerangka konstitusional, masyarakat sipil, sektor swasta, serta struktur kelembagaan global ataupun internasional yang terbatas. Tata kelola digunakan di sini sebagai konsep yang lebih luas daripada bentuk pemerintahan tradisional, sepihak, serta otoriter di mana elit penguasa duduk dalam posisi untuk memerintah di satu sisi.

Oleh karena itu, ini mencakup serta mempromosikan keterlibatan serta kolaborasi dalam lingkungan nasional serta internasional yang semakin kompleks, beragam, serta dinamis dalam tata kelola. Konsep “kesehatan” digunakan untuk menonjolkan kaidah dimensi kualitas baik dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi serta manajemen. Pemerintah mengacu pada fungsi pemerintahan oleh setiap aktor ataupun otoritas ataupun lembaga, termasuk non-pemerintah, di mana pemerintahan terdiri dari proses, struktur nilai, manajemen, kebijakan serta administrasi. Konsep *Good Governance* digunakan untuk mengidentifikasi sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara nasional serta memang sempurna secara ekonomi/finansial, politik, moral, tetapi juga global/internasional. Serta kuat dalam berpartisipasi dalam dialog yang dibuat sendiri serta dibuat sendiri dengan pemerintah mereka. Gaya bebas. Tata kelola yang baik di sini mencerminkan kerja pemerintahan serta administrasi dengan organisasi serta kinerja organisasi yang kuat yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga diharapkan, akuntabel, responsif, serta transparan, korektif internal, bahkan strategis, juga diarahkan untuk operasional jangka panjang serta jangka pendek.

Tata kelola yang baik terdiri dari banyak komponen ataupun dimensi penting. Sebagai elemen dari sistem yang dinamis, elemen ini berinteraksi secara dinamis dengan yang lain, serta dalam semua bentuknya yang berbeda bekerja pada perbedaan internal, kompleksitas, intensitas, serta tantangan eksternal, kendala serta interaksi konstan eksternal arah serta tindakan, berfokus pada pemeliharaan dinamika sistem pemerintahan. Cocok untuk tujuan.

Keanekaragaman memberikan kesempatan bagi pemerintahan untuk mencari umpan balik dari pesaing dialektis yang berfungsi sebagai mekanisme check and balance. Keanekaragaman juga memperkenalkan darah baru ke dalam sistem serta mendorong inovasi serta kreativitas. Kompleksitas tersebut

diperparah dengan semakin meningkatnya infiltrasi berbagai kekuatan eksternal serta lingkungan yang menantang pelaksanaan dinamika perubahan serta pelaksanaan sistem pemerintahan. Dengan demikian, kompleksitas ialah produk dari interaksi yang tinggi antara kekuatan dialektis yang memelihara energi dari sistem pemerintahan yang memiliki banyak segi. Proses ini mengarah ke tingkat intensitas yang berbeda dalam sistem pemerintahan, respons dinamisnya terhadap operasi internasional serta tekanan internal serta eksternal, peluang serta tantangan lokal, nasional, regional serta global. Mendukung elemen sistem internal bersama dengan peluang eksternal lainnya.

Dimensi-dimensi Good Governance ialah: 1) action; 2) struktur; 3) pengetahuan; serta kinerja; 4) konstitusi; 5) organisasi serta lembaga; 6) manajemen serta kinerja; 7) standar; 8) sektor; 9) kekuatan internasional serta global; 10) etika, akuntabilitas serta transparansi. Setiap dimensi bekerja bersama-sama dengan yang lain, seperti orkestra dengan kepemimpinan yang kuat serta partisipasi dinamis dalam interaksi elemen ataupun komponen kunci di atas, memberikan kualitas pada sistem pemerintahan di luar ekspektasi.

Proses pemerintahan yang baik melibatkan proses pemerintahan di mana semua ataupun semua pemangku kepentingannya berinteraksi. Artinya Good Governance juga harus mau. Namun tata kelola yang baik tidak hanya tentang proses internal serta eksternal tetapi juga strukturnya.

Struktur Good Governance dapat kita pahami dengan regulasi ataupun aturan aturan yang diberlakukan, dengan adanya regulasi akan menambah mutu atau kualitas. Dengan kualitas yang di capai suatu instansi ataupun organisasi akan lebih kuat, hal ini berjalan secara vertikal dan horizontal

dengan dipengaruhi oleh beragam faktor dan kekuatan internal dan eksternal lokal maupun internasional.

Kebijakan sound governan mencakup segala kebutuhan masyarakat Desa yang mengharap adanya hal-hal yang positif berpihak kepada masyarakat dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas tentunya keterlibatan masyarakat harus aktif. Jika partisipasi rendah pemerintah akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi, dan kemudian kebijakan hanya menjadi objek atau subjek yang pasif dari aktifitas pemerintahan, dan akhirnya akan menimbulkan rendahnya legitimasi dan krisis governance.

Etika, akuntabilitas serta transparansi, ciri utama Good Governance di masa depan didasarkan pada nilai-nilai etika, persyaratan akuntabilitas, struktur serta nilai transparansi. Ini ialah prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam mengkaji kembali kapasitas yang terabaikan serta korupsi sistem serta bertentangan dengan prinsip buta efisiensi serta ekonomi dalam proses administrasi serta manajemen.

## **B. Gambaran umum Desa**

### **a. Sejarah Desa**



Gambar 1. 1 balai Desa Ngroto

Bersumber dari hasil wawancara serta berbagai literatur sejarah Desa Ngroto mengatakan bahwa wilayah ini mulai tersorot serta mengalami pertumbuhan penduduk pada masa penyebaran islam sunan kalijaga. Pada masa itu turut menjadi pelopor penyebaran islam ulama utusan kanjeng sunan kalijaga yang bernama syekh abdurrahman yang juga dijuluki sebagai shekh abdurrahman ganjur karena beliau seorang ulama yang pandai membuat alat musik tradisional yaitu ganjur pada pagelaran wayang kulit pada abad ke 15.

Dikutip dari laman nu online bahwa setelah abad syekh abdurrahman wafat, datang seorang yang bernama khamidin kepedukuhan Ngroto untuk memperdalam ajaran islam, karena informasi keislaman yang diajarkan syekh abdurrahman di Desa Ngroto sudah menyebar sampai ke wilayah wilayah lain. Setelah mendalami islam diwilayah tersebut khamidin kemudian menikah dengan wanita setempat serta karena ilmu agama serta kepemimpinan yang dimiliki beliau diangkat sebagai demang (kepala dukuh) wilayah Ngroto pada masa itu. Selang berjalannya waktu masa kemas kini Desa Ngroto menjadi wilayah yang cukup besar dengan syiar islam terbesar di bandingkan wilayah ataupun Desa Desa lain yang berada di kecamatan gubug serta sekitarnya.

Berkat syiar islam yang begitu besar di Desa ini pada tahun 2002 turut datang tokoh politik sekaligus tokoh agama di negara ini yaitu kh. Abdurrahman wahid yang juga disapa gusdur bersama ibu megawati soekarno putri yang tidak lian ialah presiden serta wakil presiden negara republik indonesia yang ke 4. Beliau datang untuk berziarah serta mengunjungi makam simbah khoiron yang tidak lain ialah leluhur dari gusdur.

Berdasarkan pendapat dari heru wardono yang lebih seting dipanggil mbah bejo, penggemar sejarah serta budaya Kabupaten Grobogan, gusdur ialah turunan seorang wanita bernama khoiron yang dipimpin oleh kyi siradjudin. Setelah menyelesaikan al-qur'an, ia juga menjadi lumut di Desa Ngrototo. Karena kecil serta kecil, ia mendapat julukan mbah gareng. Kai khairun

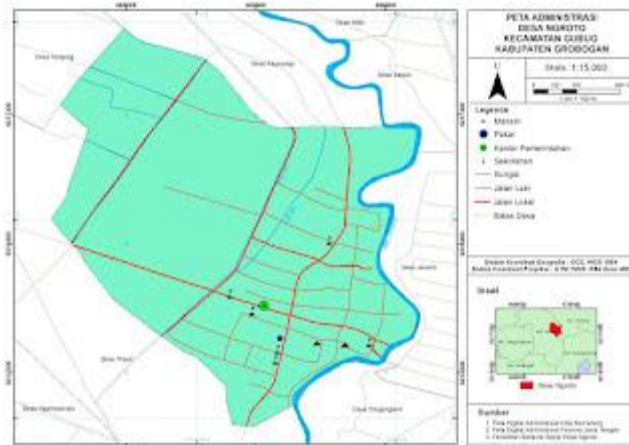
memiliki dua putra bernama asyari serta asangari. Asyari mengembangkan ilmu agama di jombang, jawa timur, menjadi seorang kiai serta mendirikan sebuah keluarga di sana. Kyai asy'ari menurunkan kh. Hassam asiri, pendiri nadaat ulama. Hasim asyari mengangkat h. Wahid haseem, menteri agama pertama republik indonesia, ayah dari presiden keempat republik indonesia, k. Abdul rahman wahid, yang juga dikenal sebagai gusdor. Ngroto diangkat menjadi baidlowi (kepala Desa pertama Ngroto). Bedlvi menjatuhkan sokimi, serta sokimi menjatuhkan zehri.

b. Letak geografis Desa Ngroto

1. Kondisi umum Desa

Ngroto adalah termasuk dalam Desa di kecamatan gubug, grobogan, jawa tengah, indonesia. Kecamatan gubug berlokasi secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan tegowanu, di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan kebonagung, kabupaten demak, batas di sebelah timur dengan kecamatan godong serta karangrayung serta di selatan berbatasan dengan oleh kecamatan responharjo. Secara administratif kecamatan kandang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Desa dengan kantor camat berada di Desa kandang. Berdasarkan hasil kajian penggunaan lahan tahun 1983, kecamatan gubug memiliki luas lahan 7.111,25 hektar, jarak dari utara ke selatan  $\pm 18$  km serta jarak dari barat ke timur  $\pm 11$  km. Sedangkan Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang terletak pada ls  $07^{\circ}05'34^{\circ}$  ls serta bt  $110^{\circ}41'30^{\circ}$  t memiliki luas +309.910 ha, terdiri dari persawahan, persawahan, pemukiman, pekuburan, serta pekarangan. Batas wilayah Desa Ngroto ialah sebagai berikut::





Gambar 1. 2 peta Desa Ngroto

## 2. Batas wilayah Desa

Dari gambaran umum Desa dapat diinformasikan bahwa Desa Ngroto memiliki lahan pemukiman lebih kecil dari pada lahan pertanian, serta sebenarnya lahan pemukiman juga masih berjarak antara rumah satu dengan yang lainnya di beberapa tempat sehingga menjadi pekarangan ataupun tanah kosong. Adapun batas wilayah Desa Ngroto sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa papanrejo
- Sebeah timur : Desa jeketro
- Sebelah selatan : Desa genggang
- Sebelah barat : Desa trisari

## c. Lembaga pemerintahan

### 1. Aparat pemerintahan Desa

Desa Ngroto sebagai organisasi pemerintahan yang di kepalai oleh kepala Desa seerta kepala bidang pendukung lainnya, diantaranya akan penulis cantumkan struktur organisasi pemerintahan Desa Ngroto kecamatan gunung Kabupaten Grobogan:

Jabatan	Nama	Pendidikan terakhir
Kepala Desa	Warsin	Sma
Kaur perencanaan	Aris ardiyanto	S1
Kaur tata usaha serta umum	Ari rahman saputra	S1
Kaur keuangan	Faiz fahlevi	S1
Kaur pemerintahan	Sudiro	Sma
Kasi kesejahteraan	Nur kholipah	S1
Kasi pelayanan	Nur rosyid	S1
Kepala dusun 1	M. Saiful munir	Sma
Kepala dusun 2	Dewi utami	S1

Tabel 1. 1 aparat pemerintah Desa

\*hasil wawancara bersama kaur perencanaan pada 10 september 2021

## 2. Badan permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (bpd) ialah bentuk ataupun lambang demokrasi di Desa. Demokrasi artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang menjadi korban retorika serta agresi bpd serta badan-badan masyarakat lainnya. Tugas badan permusyawaratan Desa (bpd) ialah bekerja sama dengan kepala Desa untuk menetapkan peraturan Desa, menyesuaikan aspirasi masyarakat serta membimbingnya. Oleh karena itu, bpd sebagai entitas yang dipikirkan dengan matang yang dimulai dari masyarakat Desa, selain memenuhi fungsinya sebagai jembatan antara kepala Desa serta masyarakat Desa, juga dapat menjadi entitas yang adalah entitas. Perwakilan komunitas sehubungan dengan tugasnya menetapkan peraturan Desa, bpd bersama-sama dengan kepala Desa menetapkan peraturan Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, tetapi menentukan semua aspirasi masyarakat. Melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Pernyataan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui bpd.
2. Agresi ialah proses mengumpulkan, mengkaji serta mengutamakan keinginan-keinginan yang akan dirumuskan dalam peraturan Desa.
3. Penyusunan kata ialah proses penyusunan bpd serta/ataupun rancangan peraturan Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa.
4. Musyawarah ialah proses dialog bersama antara pemerintah Desa serta bpd dengan masyarakat..

Adapun susunan bpd Desa Ngroto dapat dilihat pada table dibawah :

Jabatan	Nama	Pendidikan terakhir
Ketua	Asiq muhammad	S1
Wakil ketua	Shodiq	S1
Sekretaris	Abdurrozaq	S1
Anggota	Ihsan	Slta
Anggota	Ahmad syarifudin	Slta
Anggota	Heri setiawan	S1
Anggota	Zainal abidin	Slta
Anggota	Supriyanto	Slta
Anggota	Surati	Slta

Tabel 1. 2 keorganisasian bpd

\*hasil wawancara bersama sekretaris bpd pada 16 mei 2022

#### d. Kondisi demografi

##### 1. Laju pertumbuhan serta kepadatan penduduk

Penduduk Desa terus mengalami pertumbuhan penduduk, sesuai dengan data statistik daerah kecamatan gubug per- tahun 2016 penduduk Desa Ngroto berjumlah 5.263 (lima ribu duaratus enam puluh tiga) jiwa yang terdiri dari 2.655 (dua ribu enam ratus limapuluh lima) jiwa laki-laki serta 2.608 (dua ribu enam ratus delapan) jiwa perempuan dengan sex ratio 101,80. Luas wilayah Desa Ngroto

335,00 ha dengan lahan kering seluas 186,00 ha sedangkan luas persawahan mencapai 149,00 ha. Sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan pendapat dari data rekapitulasi jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin jumlah kepala keluarga di Desa Ngroto mencapai 1.815 dengan perhitungan laki-laki sebanyak 1.448 sedangkan perempuan sebanyak 367. Diperjelas dengan data rekapitulasi jumlah rumah penduduk per tahun 2021 bulan Januari sebanyak 1.628.

## 2. Pendidikan masyarakat

Desa Ngroto menjadi salah satu Desa yang memiliki fasilitas pendidikan yang cukup mulai dari tk sd smp smk, hingga taraf madrasah yaitu ra madin mts serta ma, sedangkan siswa yang akan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi akan pergi ke kota. Desa ini juga menjadi tempat para santri dari berbagai kota besar di Jawa Tengah untuk menuntut ilmu agama, adanya pondok pesantren assalafi miftahul huda serta pondok pesantren utsmaniyah menjadi basis pendidikan agama di Desa ini. Dengan jumlah yang tidak sedikit santri di Desa ini didominasi dari luar kota, di ppmh santri putri mencapai 600 santri sedangkan santri putra mencapai 800 santri, hal ini menandakan Desa Ngroto memiliki kepercayaan di mata orang-orang luar akan keilmuan agama yang cukup baik. Di bawah asuhan KH Munir Abdullah sebagai pengasuh pondok pesantren miftahul huda serta sebagai tokoh agama yang paling dituakan di Desa Ngroto. Sedangkan jumlah di pondok pesantren ustmaniyah mencapai 250 untuk gabungan putri serta putra. Di sisi lain di Desa ini juga memiliki kepedulian yang besar terhadap pendidikan agama untuk pemuda serta anaknya di lihat dari adanya tempat ngaji (langgar/mushola) di setiap rt-nya, serta adanya

pondok lain yang mengajarkan ilmu agama. Berikut penulis cantumkan hasil observasi diDesa ini:

Tabel iv. Daftar guru ngaji

No	Guru	Yang diajarkan				Bentuk pembelajaran	
		Alquran	Maulid	Manaqib	Kitab	Mondok (menetap)	Kalangan (datang)
1	Mak de qomariyah putri	✓	-	-	-	-	✓
2	Nyi darti putri	✓	-	-	-	-	✓
3	Kang firin	✓	-	✓	-	-	✓
4	Langgar (pak jum)	✓	-	-	-	-	✓
5	Mbah bari	✓	-	-	-	-	✓
6	Lek sururi (pakne lek patah)	✓	-	-	-	-	✓
7	Pak samsul hadi & istri (mambaul ulum)	✓	-	-	-	✓	✓
8	Mbah janah (ppds)	✓	-	-	-	✓	✓
9	Mbah monah	✓	-	-	-	✓	✓
10	Pak to	✓	✓	-	✓	-	✓
11	Mbak diyah	✓	-	-	-	-	✓
12	Makde asiyah	✓	-	-	-	-	✓

13	Pakde nur pamuji	✓	-	-	-	-	✓
14	Mba fitri (putri)	✓	-	-	-	-	✓
15	Mba yanti (putri)	✓	-	-	-	-	✓
16	Mba akhilyatulhana	✓	-	-	-	-	✓
17	Bu sutroh	✓	-	-	-	-	✓
18	Mbah dam	✓	✓	✓	-	-	✓
19	Mbah mashudi	✓	✓	✓ -	-	-	✓
20	Mbah si'in & mas toyo (langgar)	✓	✓	-	-	-	✓
21	Pak nomo	✓	✓	-	-	-	✓
22	Habib abdulloh	✓	✓	✓	-	-	✓
23	Kak ipah	✓	-	-	-	-	✓
24	Mbah masnuri	✓	-	-	-	-	✓
25	Yai makin	✓	✓	✓ -	-	✓	✓
26	Mbah khan & bu yanah	✓	✓	-	-	-	✓
27	Lek mudrikah	✓	-	-	-	-	✓
28	Mbah rodhi	✓	-	-	-	-	✓
29	Mbah kuri	✓	-	-	-	-	✓

30	Pak tuwo khamdun	✓	-	-	-	-	✓
31	Mas haryono	✓	✓	-	-	-	✓
32	Kang den	✓	✓	✓	-	-	✓
33	Makde hanik	✓	-	-	-	-	✓

Tabel 1. 3 daftar guru ngaji

\*hasil wawancara bersama tokoh masyarakat rt/rw setempat

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Desa Ngroto dalam pembelajaran agama islam sudah sangat kental dilihat dari amalan amalan yang dilakukan serta pengajaran setiap harinya. Selain dua pondok pesantren yang menjadi pusat pengajaran agama Desa ini juga memiliki segudang orang orang alim yang mengajarkan pendidikan agama di kampung kampung mereka. Pengajaran yang dilakukan bukan hanya alquran tetapi juga maulid manaqib serta kitab kitab karangan orang orang sholih dahulu. Pembelajaran seperti ini hanya bisa di dapat di Desa Desa yang masih kaya akan *tepo sliro* antar masyarakat serta menjunjung adab yang tionggi anta murid serta guru gurunya. Ketika adab masih dipegang teguh dalam kehidupan sehari hari maka akan mendapatkan kenikmatan hidup serta kemudahan yang terus diberikan oleh Allah SWT. Melihat jaman sekarang yang sudah semakin tidak karuan, berita mengenai anak-anak berlaku tidak sepatutnya kepada orang tua maupun gurunya sudah menandakan hilangnya adab serta budi pekerti pada generasi penerus. Dalam pembelajaran bisa dicontoh untuk wilayah lain agar supaya menanamkan religitas sedari dini serta terus berlangsung, tidak hanya di hari hari tertentu saja. Waktu mengaji ialah sore hari sholat lima waktu terus di jalankan di masjid mushola surau/langgar serta pembelajaran melalui kyai-kyai kampung nyatanya sangat efektif dalam

memberikan pemahaman kepada para generasi penerus seperti yang dilakuakn di Desa Ngroto.

Selain pondok pesantren serta berbagai pengajaran agama didalamnya Desa Ngroto juga mempunyai instansi pendidikan formal lain, diantaranya:

No	Nama instansi	Jumlah siswa	Jumlah tendik
1	Tk pertiwi	90	4
2	Tk yaspia	114	5
3	Madin yaspia	180	24
4	Sdn 01/sdn 02/sdn 03	642	27
5	Mts yaspia	595	34
6	Ma yaspia	185	21
7	Mts ustmaniyah	114	15
8	Ma ustmaniyah	90	
9	Smp miftahul huda	414	34
10	Smk miftahul huda	202	28

Tabel 1. 4 daftar lembaga pendidikan

\*hasil wawancara bersam tendik instansi terkait

Pembelajaran agama yang terjadi di Desa Ngroto kecamatan gubug kabupaten grobogan di desari dari sejarah, yaitu penyebaran islam oleh syekh abdurrahman ganjur serta satu abat setelahnya oleh syekh sirajudin. Turun temurun melalui mbah khamidin. Hingga sekarang berdiri dua pondok besar assalaf yaitu pondok pesantren miftahul huda serta pondok pesantren ustmaniyah. Serta peran dari kh munir abdulloh sebagai sesepuh yang menjadi rujukan segala sesuatu yang ada di Desa Ngroto, mulai dari amalan, pengajaran ilmu agama serta pendidikan formal. Peran kiyai kampung juga sangat urgen dalam pengajaran agama di kampung kampung. Dengan sistem datang untuk mengaji pulang setelah selesai mengaji. Oleh anak anak



kampung dengan berbondong-bondong mendatangi surau serta rumahnya orang-orang shalih pada sore hari serta selesai ketika sudah mengikuti sholat isya berjamaah. Hal semacam ini hanya bisa didapatkan dengan ketulusan hati untuk ikut mensyiarkan agama islam. Pembelajaran bil hikmah menjadi pedoman para kyai di kampung kampung seperti yang ada di Desa Ngroto ini.

Dengan data diatas penulis ingin memberitahukan bahwa Desa Ngroto adalah Desa yang religius dibanding Desa yang lain dengan tidak mengurangi keintelektualan seorang siswa maupun pendidik yang ada didalamnya. Hal ini tentunya berdampak kepada jalannya pemerintahan diDesa tersebut, proses pembangunan partisipasi serta pengawasan yang dilakukan.

### 3. Mata pencaharian pokok

Gambar iii. Lahan pertanian



Gambar 1. 3 lahan pertanian

Masyarakat Desa tidak semua bergantung kepada hasil bumi di persawahan serta ladang, tetapi juga bekerja disektor lainnya seperti wiraswasta hingga buruh. Hasil observasi menunjukkan sebagian besar

pemuda (usia produktif) memilih bekerja diluar serta meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Serta orangtuanya menggarap ladang serta sawah di Desa.

Jenis pekerjaan	Jumlah
Petani	46.83 %
Peternak	2.75 %
Pedagang	16.52 %
Buruh	24.79 %
Asn	8.26 %

Tabel 1. 5 presentasi profesi

#### 4. Agama

Di indonesia, agama yang diakui ialah 5 agama yaitu, islam, katolik, kristen protestan, hindu serta budha. Di Desa Ngroto agama islam ialah agama yang mayoritas hampir 100% dianut oleh masyarakatnya dibanding dengan Desa-Desa lain disekitarnya, seperti yang di laporkan dalam catatan statistik kecamatan gubug tahun 2016 bahwa agama katolik menjadi salah satu agama yang banyak dianut oleh masyarakat wilayah tersebut. Berikut ialah table jumlah masyarakat kecamatan gubug berdesarkan agama/ aliran kepercayaannya :

Tabel vii. Jumlah pemeluk agama

Agama	Jumlah
Islam	75.473
Kristen	464
Kstolik	1.123
Hindu	7

Khonghucu	7
Jumlah	77.074

Tabel 1. 6 data pemeluk agama

\*sumber data statistik kecamatan gubug 2016

## 5. Sumber daya alam

Gambar iv. Sumber daya alam



Gambar 1. 4 sumber daya alam

Dilihat dari letak geografis Desa yang memiliki lahan persawahan begitu luas serta ladang yang berada di sebelah utara Desa menjadikan Desa ini salahsatu Desa penghasil padi yag cukup besar dibanding Desa lainnya di kecamatan gubug. Seperti yang ditulis dalam laporan statistik kecamatan gubug yang mendapatkan hasil panen dari jagung padi serta kacang hijau. Berikut tabel pembanding diantara nya:

Komoditas	Luas panen (2015)
Padi	7.491
Jagung	1.854
Kacang hijau	892

Tabel 1. 7 komoditas pertanian

\*sumber uptd pertanian tanaman pangan kec. Gubug kab. Grobogan

Keadaan iklimnya sangat cukup untuk kebutuhan pertanian sesuai musim tanamnya. Curah hujan dikecamatan gubug mencapai 95 hari dalam setahun dengan curah hujan tertinggi pada bulan desember dengan hari hujan sebanyak 14 hari. Sedangkan disektor peternakan Desa Ngroto juga menghasilkan beberapa komoditas diantaranya, sapi, kerbau, kambing serta domba. Berikut tabel diantaranya:

Jenis ternak	2013	2014	2015
Sapi	135	124	136
Kerbau	21	21	26
Kambing	5306	7923	9128
Domba	4492	7582	8957

Tabel 1. 8 komoditas peternakan

\*sumber uptd peternakan serta perikanan kec. Gubug kab. Grobogan

Kondisi wilayah yang mendukung untuk dijadikan lahan peternakan, seperti sumber pakan yang melimpah, banyak lahan untuk menggembala serta sumber air tidak sulit ditemukan. Banyak dari masyarakat Ngroto juga memelihara hewan ternak.

## 6. Antropologis

Gambar v. Tadisi apitan



Gambar 1. 5 tradisi apitan

Suku serta adat yang ada di Desa ini mayoritas ialah suku serta adat jawa, sangat mudah ditemui dalam prosesi pernikahan yang diadakan masyarakat. Kegiatan kebudayaan yang menjadi tradisi tahunan di Desa ini ialah sedekah bumi yang diadakan bulan apit dalam penanggalan jawa. Sedekah bumi di bulan apit juga sering disebut apitan, kegiatan ini dilakukan di rumah kepala Desa serta dihadiri seluruh masyarakat Desa, yang unik dari tradisi ini ialah menyebarkan uang koin puluhan ribu sampai jutaan yang mana akan diperebutkan oleh anak-anak kecil yang hadir di acara tersebut. Setelah itu digelar doa bersama serta emakan besar (sego galeng) di kediaman kepala Desa. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi diantara warga yang hadir.

#### 7. Prasarana serta sarana Desa Ngroto

Gambar



Gambar 1. 6 musholla miftahul huda

Keberhasilan pembangunan, baik secara fisik maupun administratif, serta peran serta masyarakat dalam kapasitas kelembagaan Desa, dapat dilihat terutama melalui berbagai sarana serta prasarana yang ada. Untuk mendalami perkembangan Desa Ngroto khususnya pada faktor kelembagaan pemerintahan Desa, maka penting bagi peneliti untuk mengutip sarana serta jenis prasarana yang ada sebagai acuan agar perkembangan Desa Ngroto dapat terlihat kepermukaan. Desa dengan sarana serta prasarana yang baik menjadi faktor keseriusan kerja pemerintah Desa serta perangkatnya.

Kehidupan sosial masyarakat Ngroto terjalin dengan baik, bisa dilihat dari berbagai kegiatan sosial yang tidak kekurangan partisipasi dari masyarakat, baik kegiatan yang terorganisir dengan adanya kepanitiaan seperti kegiatan sedekah bumi hingga kegiatan insidental seperti kematian warga. Hal ini dikarenakan rasa kekeluargaan yang cukup besar diantara warga menjadikan kegiatan gotong royong kerjabakti menjadi ajang silaturahmi bagi warga Desa. Untuk menjaga prasarana maupun sarana yang telah di sediakan menjadi fasilitas umum oleh pemerintah Desa bagi masyarakat. Diantara sarana yang ada di Desa ini yaitu tempat

peribadatan seperti musholla serta masjid, pusat perbelanjaan ada pasar, sarana pendidikan sekolah. Untuk lebih terperinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Play grup	1
2	Tk	2
3	Sd	3
4	Smp	1
5	Smk	1
6	Madin	2
7	Mts	2
8	Ma	2
9	Masjid	1
10	Musholla	1
11	Langgar	18
12	Pondok pesantren	3
12	Pasar	1
13	Balai Desa	1
14	Pos kampling	26

Tabel 1. 9 sarana dan prasarana

\*sumber data wawancara bersama kadus pada 21 mei 2022

## 8. Sosiologis

Lembaga kemasyarakatan Desa (lkd) antara lain rukun tetangga (rt), rukun warga (rw) pemberdayaan keluarga sejahtera (pkk), karang taruna, tempat pelayanan terpadu (poziando), serta lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (lpmd). Organisasi masyarakat Desa adalah mitra dalam pemberdayaan masyarakat Desa

serta menjadi wadah partisipasi masyarakat Desa serta berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh inisiatif pemerintah Desa serta masyarakat. Pembentukan lkd diatur dengan rincian kerja dalam peraturan Desa:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa
2. Berpartisipasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Sedangkan fungsi lkd ialah sebagai berikut:

1. Akomodasi serta pengarah aspirasi masyarakat
2. Mempromosikan serta memupuk rasa persatuan serta kesatuan dalam masyarakat
3. Meningkatkan kualitas serta percepatan pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlindungan, serta pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Memperluas, mengembangkan, serta memobilisasi prakarsa, partisipasi, swadaya, serta kolaborasi komunitas
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Adapun lembaga kemasyarakatan Desa Ngroto dapat dilihat dari tabel berikut:

#### **Lembaga kemasyarakatan**

Nama lembaga kemasyarakatan	Pkk
Jumlah	1
Jumlah pengurus	7
Alamat kantor	Kantor balai Desa Ngroto



Ruang lingkup kegiatan	Simpan pinjam/up2k serta gotong royong
<b>Nama lembaga kemasyarakatan</b>	<b>Lkmd</b>
Jumlah	1
Jumlah pengurus	7
Alamat kantor	Kantor balai Desa Ngroto
Ruang lingkup kegiatan	Perencanaan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat
<b>Nama lembaga kemasyarakatan</b>	<b>Karang taruna</b>
Jumlah	4
Jumlah pengurus	16 (irma, ras, irmadu, baturagung)
Alamat kantor	Desa Ngroto
Ruang lingkup kegiatan	Kegiatan keagamaan, bakti sosial dll
<b>Nama lembaga kemasyarakatan</b>	<b>Fkd</b>
Jumlah	1
Jumlah pengurus	7
Alamat kantor	Balai Desa Ngroto
Ruang lingkup kegiatan	Pelopor kesehatan masyarakat Desa
<b>Nama lembaga kemasyarakatan</b>	<b>Linmas</b>
Jumlah	1
Jumlah pengurus	7
Alamat kantor	Balai Desa Ngroto

Ruang lingkup kegiatan	Bertanggungjawab atas keamanan Desa Ngroto
------------------------	--

Tabel 1. 10 lembaga kemasyarakatan Desa

\*data wawancara bersama kaur

Dari tabel diatas menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Ngroto cukup baik, ditunjukkan dengan adanya lembaga-lembaga yang menaungi masysrakat dalam membangun Desa. Desa menjadi lebih terstruktur jika unsur masyarakat ikut banyak ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan yang terjadi di Desa Ngroto. Seperti hanya pembangunan, kegiatan kemastarakatan kegiatan keagamaan serta lain sebagainya. Pemerintah Desa Ngroto juga memberikan ruang untuk masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga adanya timbal balik yang baik diantara pemerintah Desa serta masyarakat Desa Ngroto itu sendiri. Contoh kegiatan kemasyarakatan haul Desa Ngroto, dengan penuh kesadaran masyarakat berbondong-bondong mensukseskan kegiatan tersebut serta pemerintah Desa dengan segenap kepedulian mendukung kegiatan tersebut. Seperti yang dituturkan salahsatu masyarakat Desa Ngroto ibu muskiroh pada sesi wawancara 06/04/2022:

*...kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah Desa cukup baik, contohnya dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Ngroto, masyarakat tidak perlu di paksa pasti datang serta ikut dalam kegiatan tersebut, sseperti haul akbar yang dilaksanakan lebih besar dari haul satu muharam pastinya membutuhkan dana yang lebih untuk menyelenggarakannya, yang seperti ini masyarakat dengan suka rela memberikan sumbangan serta adanya pendataan untuk orang-orang yang menyumbang dalam kegiatan ini dengan mengumpulkan amplop yang berisi uang*

*sumbangan serta tertulis nama-nama keluarga yang sudah wafat untuk ikut dikirimkan doa bersama di kegiatan tersebut. Contoh lain kegiatan maulid nabi ataupun isra mi'raj yang dilaksanakan di masjid jami'sirajudin, masyarakat Desa juga ikut memberikan kemurahan hatinya untuk datang serta membawa makanan berupa makanan ringan serta tumpeng. Jadi ketika perayaan maulid nabi maupun isra miraj pasti ada ratusan tumpeng yang diantar ke masjid untuk di bagikan ketika selesai kegiatan tersebut...*

Hasil wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan untuk kesadaran masyarakat sangat besar dalam hal kegiatan keagamaan. Disisilain penulis juga ingin memberikan gambaran kepartisipasian masyarakat ketika kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan, contoh gptpng royong merawat infrastuktur yang sudah ada,

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NGROTO KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN

Desa Ngroto menjadi desa yang cukup produktif dengan segala fasilitas yang tersedia untuk masyarakatnya, dalam artian masyarakat Desa dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan membuat sesuatu yang ada disekitar mereka menjadi lebih berdaya guna. Didukung dengan fasilitas yang disediakan pemerintah Desa dengan membangun infrastuktur sesuai kebutuhan masrakat Desa, ini menjadi baik karena dapat tepat sasaran serta tidak menghamburkan anggaran untuk program yang kurang efektif. Pada tahun 2021, pemerintah Desa Ngroto merencanakan sejumlah program kerja yang dirancang berdesarkan rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) yang dikembangkan tahun lalu, dengan fokus pada sektor penyelenggara pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat, bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

Dari perencanaan diatas pemerintah desa Ngroto memiliki tiga sumber pendapatan yaitu sebagai berikut

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Pendapatan asli desa	Rp. 1.012.922.500
2	Pendapatan transfer	Rp. 1.480.943.000
3	Pendapatan lain-lain	Rp. 7.800.000
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 2.501.665.500

Dari tabel diatas pemerintah Desa Ngroto memiliki berbagai kesempatan untuk melakukan perencanaan untuk menambah kemakmuran masyarakat desa sesuai bagian yang sudah disampaikan di atas. Adapun perencanaan yang dirancang pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan pengelolaan yang baik oleh pemerintah Desa, diharapkan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk pembangunan serta kesejahteraan Desa, kesejahteraan masyarakat Desa dapat dilihat dari hasil pembangunan yang yang terlaksana (Kartasmita 1995). Berbagai hal yang menjadi tunjan dalam pemerintahan Desa, anggaran mencakup akomodasi yang dibutuhkan untuk membayar gaji serta tunjangan pegawai. Pada 15 januari 2014, pemerintah mengesahkan undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang mengubah status Desa pamong ataupun perangkat Desa. Peraturan sebelumnya yaitu berlakunya pp no 72 tahun 2005 serta uu no 32 tahun 2004, menyatakan bahwa sekretaris Desa harus membantu kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, termasuk urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Namun, sejak berlakunya uu no. 6 tahun 2014, status sekretaris Desa serta perangkat Desa lainnya tidak lagi menjadi pegawai pemerintah.

Sedangkan dalam rencana pembelanjaan, desa Ngroto menjadikan beberapa kategori seperti, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Seperti yang tuangkan dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Belanja pegawai	Rp. 435.842.500
2	Belanja barang dan jasa	Rp. 444.097.000
3	Belanja modal	Rp. 1.017.926.000
4	Belanja tidak terduga	Rp. 538.800.000
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 2.436.665.500

\*sumber dokumen perdes nomor 07 tahun 2020 tentang ApbDes 2021

Anggaran yang terencana merupakan hasil dari penjabaran rpjm desa yang di susun untuk melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. kemudian dirumuskan lagi dalam pelaksanaan musyawarah dusun, musyawarah pembangunan dan juga musyawarah penetapan. Sehingga didapati rancangan pembangunan untuk tahun 2021. Adapun penjabaran pembiayaan per-bidang sebgai berikut:

## A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pemerintah melewati instruksi dari menteri dalam negeri jelas mengeluarkan kebijakan penggunaan peralatan Desa. Yang jelas status Desa itu bukan pegawai pemerintah. Kesepakatan antara kementerian dalam negeri (Kemendagri) serta persatuan perangkat Desa seluruh Indonesia (PPDI) semakin mempertegas bahwa perangkat Desa tidak harus menjadi pegawai pemerintah tetapi kesejahteraannya ditingkatkan. Contoh anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Desa Ngroto tahun 2021 dengan anggaran yang direncanakan, diharapkan aparat Desa dapat bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat untuk pembangunan serta kesejahteraan Desanya. Dengan demikian, ada aspek etika, akuntabilitas, serta transparansi yang menjadi prinsip dasar governance scrutiny untuk mencegah penyalahgunaan serta korupsi sistem ataupun kinerja dalam proses pemerintahan serta untuk mencegah prinsip ekonomi murni yang buta (Domai 2011). Berikut ini ialah jadwal akomodasi anggaran untuk pemerintahan Desa.:

NO	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Penyelenggaraan belanja siltap,tunjangan dan operasional pemerintah desa	Rp. 539.339.500	ADD
2.	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	Rp. 23.413.000	PAD
3.	Pengelolaan administrasi	Rp. 4.800.000	ADD
4.	Penyelenggaraan tatapraja pemerintahan, peremncanaaa, keuangan dan pelaporan	Rp. 84.700.000	PAD
5.	Sub bidang pertanahan	Rp. 45.000.000	PAD,PBH
JUMLAH		Rp. 697.252.500	

Tabel 1. 11 bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

\*sumber dokumen perdes nomor 07 tahun 2020 tentang ApbDes 2021

Dengan anggaran yang sudah direncanakan harapannya pemerintah Desa Ngroto menjadi pemerintahan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap wilayahnya.

### B. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

Sektor pembangunan Desa dapat dilihat dari ketersediaan serta kondisi infrastruktur yang baik, infrastruktur menjadi penunjang bagi masyarakat Desa untuk melakukan inofasi baru. Contoh tersedianya jalan yang layak untuk mengakses lahan pertanian bagi para petani di Desa, dengan adanya akses jalan yang baik maka petani akan mudah dalam bekerja. Ladang jagung dapat tertanam serta terawat dengan baik, alat pertanian dengan mudah mengakses lahan serta yang terpenting memudahkan petani untuk mengangkut hasil panen seperti jagung serta padi. Adapun bidang pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Desa Ngroto pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
1.	Sub bidang pendidikan	Rp. 3000.000	PAD
2.	Sub bidang kesehatan	Rp. 102.400.000	ADD
3.	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp. 793.513.000	PAD
4.	Sub bidang kawasan pemukiman	Rp. 121.000.000	DDS,PBP
	JUMLAH	Rp.	

	1.019.913.000	
--	---------------	--

Tabel 1. 12 bidang pelaksanaan pembangunan Desa

\*sumber dokumen perdes nomor 07 tahun 2020 tentang ApbDes 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Desa Ngroto dalam melakukan pembangunan infrastuktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menambah kesejahteraan di Desa. Banyak usulan dari warga yang meminta pembangunan jalan agar segera teratasi semua dari ujung sampai ke ujung Desa, tetapi itu semua tidak dapat direalisasikan secara bersama karena anggaran yang harus dibagi untuk program kerja serta kebutuhan lainnya. Sehingga menjadi wacana untuk pembangunan di tahun berikutnya, seperti yang di sampaikan oleh bapak aris ardiyanto kaur perencanaan pada sesi wawancara (24/5/22):

*...kami sudah merencanakan untuk membangun infrastuktur jalan secara bertahap, dengan mendahulukan beberapa wilayah yang menjadi target utama pembangunan seperti jalan utama utara keselatan serta timu ke barat. Untuk jalan yang ada di masing-masing rtdengan anggaran dibawah 100 juta akan di bangun mendatang, dengan pertimbangan ke urgensiannya. Pembangunan jalan ini kita laksanakan dari wilayah utara keselatan, mengingat Desa Ngroto mempunyai sekitar 42 ruas jalan serta setiap tahunnya harus kiata rawat serta perbaiki, ini baru jalan belum yang namanya talud, gorong-gorong irigasi dll...*

Dari jawaban wawancara diatas menunjukkan kesadaran Desa Ngroto untuk melakukan pembangunan yang komprehensif di setiap wilayah Desa Ngroto tetapi hal itu dilakukan bertahap serta membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat Desa Ngroto adalah salah satu Desa yang cukup luas serta berpenduduk aktif berpusat, tidak terpecah oleh dusun-dusun. Penulis menyadari bahwa pembangunan tidak bisa secepat yang diminta tetapi dengan



adanya pengawasan serta kepartisipasian masyarakat hal ini kan lebih baik untuk keberlangsungan pembangunan yang sedang di lakukan.

Infrastruktur adalah alat penting bagi kemajuan perkembangan masyarakat Desa. Dengan tersedia nya infrastuktur yang layak maka akan mempermudah mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, diantaranya di bidang pendidikan murid serta guru dapat mudah mengakses lokasi sekolah (Sumodiningrat 1997). Dibidang ekonomi, penjual serta pembeli dapat mudah mengakses wilayah pasar serta mempermudah transaksi, serta bidang-bidang yang lain tentunya. Berikut penjabaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada bidang pelaksanaan pembangunan:

NO	URAIAN	ANGGAR AN	SUMBER DANA
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
1.	Pemeliharaan jalan lingkungan/gang	Rp. 20.000.000	PAD
2.	Pembangunan/rehabilitas/peninngkatan/ pengerasan jalan Desa	Rp. 230.000.000	PAD
3.	Pembangunan/rehabilitas/peninngkatan/ pengerasan jalan lingkungan pwmukiman	Rp. 114.000.000	ADD,PAD
4.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan, dll)	Rp. 409.513.000	DDS,PAD,P BP
5.	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Rp. 20.000.000	DDS
	JUMLAH	Rp. 793.513.000	

Tabel 1. 13 laporan perealisasiian pembangunan

\*sumber dokumen perdes nomor 07 tahun 2020 tentang ApbDes 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perealisasiian program kerja pembangunan oleh pemerintah Desa sudah cukup baik dengan mendahulukan berbagai pembangunan ruas jalan untuk mobilitas warga sehingga dapat menunjang perputaran perekonomian serta mobilitas pendidikan warga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya pengalihan anggaran untuk mendanai penanggulangan penebaran penyakit pada pandemi awal tahun 2020 kemarin. Hal ini dituturkan oleh bapak aris ardiyanto kaur perencanaan pada sesi wawancara (24/5/22):

*...memang pada awal penyusunan rkp pada 2020 lalu kita merancang banyak sekali sektor yang akan dibangun, tapi pada kenyataannya dengan pandemi pada awal 2020 yang mengharuskan kita fokus di sektor kesehatan masyarakat juga perlu menjadi tanggungjawab pemdes untuk bisa menjaga kenyamanan di Desa apalagi ditambah dengan Kabupaten Grobogan menjadi zona merah pada akhir 2020 kemarin. Sesuai dengan arahan bupati kepada semua lapisan pemerintahan sampai Desa maka digencarkan upaya masif pemerintah Desa untuk melakukan percepatan memtus penyebaran penyakit ituu, tetapi kita juga memiliki fokus untuk membangun Desa dengan anggaran yang ada seperti jalan talut gorong-gorong dll..*

Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa ketidak maksimalan pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan dikarenakan faktor eksternal yaitu pandemi yang datang pada awal tahun 2020, penganggaran yang dilakukan pada tahun 2020 untuk tahun 2021 memang sudah cukup baik dengan adanya berbagai sektor yang menjadi fokus pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam tabel perencanaan yang di susun pemerintah Desa. Turut hadir juga masyarakat serta elemen masyarakat lainnya untuk memberikan sumbangsih didalam musrengbang Desa Ngroto Kecamatan Gubug

Kabupaten Grobogan. Musrenbang di Desa Ngroto dilakukan setiap bulan agustus tahun berjalan, yang menjadi acuan ialah rpjm Desa yang sudah di rancang untuk jangka lima tahun pembangunan.

### C. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Pembinaan masyarakat perlu dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Berjalan linier sesuai dimensi dari konsep Good Governance yang memberikan jaminan pemerintahan yang kuat. Kita ketahui bersama bahwa pemerintahan yang kuat harus mencakup pada keseluruhan aspek hingga masyarakat terpencil. Desa Ngroto memiliki berbagai wadah bagi masyarakat agar mendapatkan pembinaan yang baik. Seperti PKK, Karangtaruna, LPMD, Satlinmas Hingga RT/RW, wadah ini terstruktur terlaksana dibantu oleh RT/RW setempat yang juga mendapatkan pembinaan dari pemerintah Desa. Dengan adanya hal semacam ini penganggaran dianggap perlu untuk menunjang kebutuhan kegiatan yang dilakukan di setiap sektor. Berikut tabel perencanaan penganggaran pada bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2021 Desa Ngroto :

NO	URAIAN	ANGGAR AN	SUMBER DANA
	BIDANG PEMBINN KEMASYARAKATAN		
1.	Sub bidang ketentremen, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rp. 14.400.000	ADD
2.	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp. 96.000.000	PAD
3.	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp. 8.400.000	ADD
4.	Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp. 34.400.000	PAD, ADD, PBP

JUMLAH	Rp. 153.200.000	
--------	--------------------	--

Tabel 1. 14 bidang pembinaan kemasyarakatan

\*sumber dokumen perdes nomor 07 tahun 2020 tentang ApbDes 2021

Dari tabel diatas dapat kita mengerti seberapa perhatian pemerintah Desa terhadap masyarakatnya untuk mendapatkan bimbingan yang baik. Pemerintah berlaku sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pengembangan diri, dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020, serta untuk beberapa kegiatan dilaksanakan pada setiap tahunnya, jadi kegiatan semacam ini ialah kegiatan rutin secara teratur dilaksanakan pada setiap tahunnya oleh masyarakat Desa Ngroto untuk memenuhi hajat sosial di lingkup masyarakat Desa Ngroto pada umumnya. Hal ini dituturkan oleh bapak munir selaku kepala dusun di Desa Ngroto pada sesi wawancara pada 2022 yang lalu mengenai kegiatan haul serta sedekah bumi:

*...kegiatan semacam ini dapat ditemukan di Desa Ngroto pada setiap tahun, haul suro pada bulan muharram, haul akbar pada bulan rabiul tsani ataupun bulan ba'da maulid, sedangkan kegiatan sedekah bumi bisa ditemui ketika bulan zulkaidah ataupun sering disebut bulan apid karena bulan yang di apid oleh dua hari raya islam yaitu syawal serta zulhijjah, nah pada bulan apid inilah masyarakat Desa Ngroto melaksanakan sedekah bumi untuk selalu mengingat kenikmatan bumi yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Pada hasil panen di setiap tahunnya...*

Kegiatan yang dijalankan masyarakat Desa sejatinya ialah bimbingan dari pemerintah Desa untuk melaksanakannya, serta juga tentunya dengan bimbingan tokoh masyarakat maupun agama yang terlibat didalamnya.

Masyarakat di bimbing untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, karena kehidupan di masyarakat setingkat Desa menjadi riskan ketika terjadi konflik didalamnya, sebagai contoh konflik di Desa yaitu konflik perbedaan pemilihan kepala Desa, konflik agraria antar tetangga, konflik antar kampung serta lain sebagainya. Dengan adanya wadah yang menaungi kegiatan masyarakat supaya menjaga kerukunan antar mereka seperti rt/rw, wadah yang menaungi kekreatifitasan pemuda yaitu karangtaruna pramuka serta lainnya, wadah yang menaungi kegiatan perempuan yaitu pkk, serta lain sebagainya. Sedangkan kegiatan religi seperti yang sudah penulis sampaikan Desa Ngroto memiliki berbagai kegiatan keagamaan, seperti haul, pitulasan, sedekah bumi dll. Dengan adanya lembaga yang ter struktur Desa Ngroto dapat menjadi lebih kuat bersama masyarakat yang makmur. Ini sejalan dengan fungsi lembaga kemasayarakatan Desa yaitu:

1. Menyesuaikan serta menyalurkan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Masyarakat Desa Ngroto dapat mengajukan usulan pembangunan langsung ke forum-forum pembangunan di forum-forum masyarakat seperti tingkat rt/rw. Jika
2. Membina serta memupuk rasa kebersamaan serta kesatuan masyarakat dalam rangka mempererat persatuan pemerintah pemerintah Desa, pemerintah kabupaten bevilacqua serta pemerintah republik indonesia.
3. Meningkatkan kualitas serta kecepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Perencanaan, pelaksanaan, perlindungan, serta pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Mengembangkan serta memimpin prakarsa, partisipasi, serta swadaya masyarakat
6. Memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat peDesaan

8. Sebagai sarana komunikasi, informasi serta sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat
9. Kami mengedepankan kreativitas masyarakat dalam upaya mengatasi penyakit sosial yang timbul di masyarakat..

Peran Ikmd saat ini dipandang masih relevan serta strategis misalnya dalam perencanaan pembangunan Desa yang sesuai sasaran kebutuhan masyarakat. Dengan seperti ini pembangunan Desa akan lebih maksimal dikarenakan sistem pemerintahan yang terstruktur. Diungkapkan oleh ali fuad selaku ketua rt4 rw 4 perwakilan masyarakat Desa Ngroto pada sesi wawancara 29 mei 2022

*...pelayanan yang ada diDesa cukup baik dengan adanya pembangunan secara menyeluruh, walaupun masih ada beberapa sektor yang belum tersentuh tetapi hal ini tinggal menunggu giliran saja. Adapun kegiatan musyawarah warga dilakukan untuk mendiskusikan pembangunan seperti pembangunan talud, cor jalan hingga pembangunan poskampling. Sedangkan kegiatan sosial yang mendukung demokrasi ialah kerja bakti serta adanya jimpitan dari warga...*

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa di tingkat rtjuga menjalankan kegiatan kegiatan yang terstruktur untuk menjaga kemaslahatan warga, setiap kampung sudah mendapatkan akses jalan yang layak serta mendapat bimbingan sosial dengan kegiatan kegiatan yang ada seperti arisan rtdiisi dengan pengajian, solawat malam jumat, kerja bakti jumat pagi serta lain sebagainya. Adanya jimpitan dikelola bersama atas arahan ketua rtsetempat, serta hasil nya dimanfaatkan warga untuk merawat fasilitas yang sudah ada selain itu juga untuk kegiatan sisial seperti menjenguk warga yang sakit.

#### A. Bidang pemberdayaan masyarakat

Apakah yang sebenarnya makna dari pemberdayaan? Pemberdayaan ialah proses membangun masyarakat menuju kondisi yang lebih baik melalui

partisipasi masyarakat itu sendiri. Kini proses pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Berbagai bidang kekuatan masyarakat meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sektor sosial budaya serta politik.

1. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi,

Pelatihan bagi UMKM, UMKM ataupun usaha mikro, kecil serta menengah ialah usaha yang didirikan serta dijalankan oleh badan usaha ataupun badan usaha perseorangan. Keberadaan UMKM di peDesaan akan membantu perekonomian masyarakat. UMKM tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Tentunya masing-masing bidang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memulai usaha melalui masyarakat Desa. Contohnya, masyarakat yang memili usaha rumahan seperti rumah produksi kripik singkoh, krupuk pasir, serta toko-toko yang berjajar disetiap perempatan jalan Desa serta lain sebag ainya. Seperti yang diungkapkan salah satu warga pelaku UMKM ibu nadia produsen jajanan pasar tentang kelebihan tempat usaha yaitu pasar sore Desa Ngroto:

*...saya pelaku usaha micro merasa terbantu dengan adanya pasar sore di Desa Ngroto, karena dapat menambah lapak jualan saya disana. Semua orang dapat membuka lapak jualan disanana serta siapapun dapat berbelanja keperluanya. Walaupun dikenakan dana kebersihan saya kira wajar saja karena memang disana ada yng membersihkan serta tempatnya juga strategis...*

Dari ungkapan diatas dapat di lihat salahsatu keseriusan Desa Ngroto dalam menggerakkan ekonomi warga yaitu dengan membuatkan pasar sore yang dimanfaatkan penjual serta pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain mba nadia disana juga banyak pelaku UMKM yang beragam produk yang di jualnya, sekitar 30 penjual pasar yang menempati lapak di

pasar sore Desa Ngroto. Pasar ini juga menjadi lokasi para pedagang kaki lima berhenti serta menjajakan dagangannya, seperti kuliner bakso mie ayam dll.

Pelatihan dua BUMDesa, BUMDesa adalah usaha Desa yang dijalankan oleh badan hukum yang dijalankan oleh pemerintah Desa. Usaha ini didanai oleh berbagai sumber seperti pemerintah, tabungan masyarakat, ataupun utang (Anoraga 2002). Namun, terkadang dana untuk bisnis ini bisa berasal dari pihak lain yang bekerja sama dengan pendiri bisnis atas dasar saling menguntungkan. BUMDesa memiliki tiga wilayah distribusi produk, yaitu zona merah, zona kuning, serta zona hijau. Zona merah untuk Desa tanpa perusahaan, zona kuning untuk Desa berkembang, serta zona hijau untuk Desa yang BUMDesanya sudah beroperasi penuh. Penerapan pelatihan BUMDesa di Ngroto kurang maksimal, seperti yang diungkapkan ibu rati salah satu anggota bpd Desa Ngroto sebagai berikut:

*...BUMDesa di Desa Ngroto pernah berjalan dengan baik beberapa tahun yang lalu hingga mengalami kepasifan dikarenakan kurangnya keseriusan pengurusnya serta perhatian dari pemerintah Desa, serta anggaran yang sudah di glontorkanpun hanya mankrak menjadi alat alat infentaris serta barang-barang yang dijual belikan di koprasi Desa...*

Dari ungkapan wawancara diatas disinyalir BUMDesa Ngroto mengalami kepasifan dikarenakan kosongnya orang-orang yang berkompeten serta memiliki fokus untuk menjalankannya dengan baik. Sebenarnya konsep yang ditawarkan pemerintah Desa sudah cukup baik dengan memberikan fasilitas tempat lokasi usaha serta memberikan bantuan permodalan diambil dari APBDesa, tetapi kurangnya kekreatifan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian

Peningkatan produksi tanaman, inisiatif sosial awal yang dilakukan pemerintah ialah mendorong petani untuk membuat saluran irigasi yang efisien sehingga tanaman dapat tumbuh bahkan di musim kemarau yang



panjang. Petani juga akan didorong untuk menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanaman mereka. Selain itu, mereka akan didorong serta didorong untuk menggunakan mesin pertanian untuk memudahkan pekerjaan mereka di pertanian. Selain itu, petani akan mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan lahan pertanian yang tepat waktu.

Kelompok tani, kelompok tani ialah berkumpulnya beberapa petani di suatu daerah yang bekerja sama di bidang pertanian untuk meningkatkan efisiensi usaha. Ada berbagai tujuan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok tani. Pertama dengan memberikan pelatihan, mengembangkan usaha pertanian, meningkatkan kemampuan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usaha pertanian sesuai rencana yang jelas, serta meningkatkan kesejahteraan setiap anggota kelompok tani. Meningkatkan kapasitas petani. Kelompok tani Desa Ngroto berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dalam bertani, seperti mengadakan pelatihan pembagian bibit tanaman serta kerjasama dalam budidaya lahan pertanian. Seperti yang dikatakan oleh pak nodri, ketua kelompok tani “bando adol”: kerjasama yang terjalin dalam kelompok tani bandwadol meliputi pengelolaan lahan bersama (pengelolaan sawah), pengelolaan aset berupa alat pemanen padi yang disewakan untuk musim panen. , serta dalam beberapa kesempatan membagikan bibit tanaman buah kepada anggota serta umumnya menjualnya kepada orang-orang yang bukan anggota. Kelompok tani ini beranggotakan sekitar 30 orang.

Ketiga pemekaran pertanian tersebut adalah contoh pemberdayaan pemerintah di masyarakat pertanian dengan memperbaiki sistem manajemen petani dalam pengelolaan hasil panen. Hal ini sering dilakukan atas dasar kasus dimana harga dengan barang terkadang tidak sesuai. Bergantung pada kendala yang dihadapi petani dalam mengelola tanaman mereka, pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga berbagai tanaman. Tujuannya

ialah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberi mereka keuntungan yang wajar dari penjualan hasil panen mereka.

## 2. Memberdayakan masyarakat dalam kesehatan

Sebagai tempat pelayanan terpadu (posyandu), posyandu adalah pelayanan kesehatan masyarakat dengan lima prioritas yaitu KB, KIA, imunisasi, serta penanggulangan diare. Posyandu adalah salah satu contoh pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang sangat populer serta dapat dijumpai hampir di setiap Desa. Posyandu juga adalah layanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpenghasilan rendah serta telah terbukti memberikan dukungan yang signifikan di bidang kesehatan. Kegiatan posyandu diselenggarakan serta dilaksanakan dengan pembagian lima meja meliputi pendaftaran, penimbangan, pengisian kartu sehat, penyuluhan kesehatan meliputi oralit, vitamin a, serta tablet besi, serta lima meja berisi vaksin, skrining serta pengobatan kesehatan, serta pelayanan dari kb.

*Forum kesehatan Desa*, pos kesehatan Desa ini berkantor di balaideda Ngroto, bersama bidan Desa yang dibantu pelaksanaannya oleh kader-kader Desa. Kegiatannya membagikan obat yang didistribusikan oleh pemerintah, seperti obat untuk pencegahan kaki gajah, penanggulangan penyakit malaria serta pendataan kesehatan berkelanjutan di Desa Ngroto guna pelaporan data kepada dinas terkait. Forum ini di ketuai oleh bapak bogem yang juga menjadi salahsatu tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayahnya, beliau menuturkan bahwa Desa Ngroto harus menjadi Desa yang sehat untuk menjadi contoh Desa-Desa yang lain, untuk itu perlu adanya konsen yang dibangun diantara masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta selalu menjalankan pola hidup yang sehat.

## 3. Pemberdayaan komunitas dibidang pendidikan

Bimbingan belajar untuk anak Desa yang ingin mengulang pelajaran dari sekolah bersama mentor pemuda Desa yang memiliki kepedulian bersama

dalam pendampingan belajar anak-anak. Hal ini di inisiasi oleh ibu yanah yang juga berstatus sebagai guru tk di Desa Ngroto. Bu yanah bersama pemuda/pemudi lainnya berupaya untuk meningkatkan keinginan anak-anak untuk belajar walaupun hanya sebatas mengulang pelajaran yang didapat disekolah pagi tadi bersama kakak-kakak pemuda Desa yang menjadi mentor. Mentor yang tergabung dalam bimbel ini kebanyakan pemuda yang telah melanjutkan kuliah di kota serta kembali di Desa. Bimbel dimulai dengan jamaah sholat maghrib serta mengaji serta dilanjutkan sholat isya kemudian bimbel. Anak-anak yang ikut bimbel dimayoritasi siswa sekolah desar, hal ini sangat positif karena dengan belajar dengan rutin akan membentuk mental anak yang rajin kedepannya. selain bimbingan belajar untuk anak-anak di desa, ada pula pelatihan it untuk perangkat Desa untuk menunjang kinerja yang lebih efisien serta efektif. Hal ini biasa dilakukan dari dinas terkait untuk mengenalkan program ataupun aplikasi baru dalam menjalankan suatu proyek tertentu seperti survei serta lain-lain.

Adapun penganggaran untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto pada tahun 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGAR AN	SUMBER DANA
	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		
1.	Sub bidang peningkatan kapasitas, aparatur desa	Rp. 22.500.000	PAD, PAD, DDS,
2.	Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM)	15.000.000	DDS
	JUMLAH	Rp. 27,500.000	

Tabel 1. 15 bidang pemberdayaan masyarakat

\*sumber dokumen perdes nomor 07 tahun 2020 tentang ApbDes 2021

Dari tabel diatas pemerintah Desa mencoba memberikan perhatian di beberapa sektor masyarakat, akan tetapi hal ini dirasa kurang tepat dikarenakan hal-hal yang penting berdesarkan pendapat dari penulis belum sepenuhnya diperhatikan, seperti memberikan perhatian terhadap pola pendidikan anak-anak diDesa, mungkin bisa jika pemerintah Desa memberikan perhatian yang lebih dengan membuat kampung Inggris untuk anak-anak belajar berbahasa, kemudian pemusatan bimbel yang dilaksanakan gratis untuk anak-anak Desa seperti yang sudah dirintis oleh ibu Yanah. Sedangkan untuk kampung Inggris sendiri ini menjadi trobosan yang unik serta bagus jika dapat dijalankan dengan penuh kesadaran serta kepedulian terhadap anak-anak di Desa. Dengan penganggaran yang tepat diharapkan program yang terkonsep dengan sungguh-sungguh dapat memiliki kemanfaatan yang berkelanjutan. Tentunya hal ini bisa dimulai dengan memperhatikan pendidikan bagi generasi penerusnya.

Pembangunan desa yang dilakukan desa ngroto merupakan interpretasi dari undang-undang No. 6 tahun 2014 bab iv tentang kewenangan desa yang menyatakan desa berwenang atas penyelenggaraan pemerintahan desa, **pelaksanaan pembangunan desa**, membina masyarakat dan memberdayakannya berdasar prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan adat istiadat desa. sehingga bisa kita katakan bahwa pemerintah desa sudah menjalankan kapasitasnya atas regulasi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Segala sesuatu yang dilakukan termasuk perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur di desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakatnya. Mengatur pendapatan serta pembelanjaan menjadi hak priogratif pemerintah desa untuk mengatur kemajuan wilayah desanya sendiri. Dengan ini desa ngroto menjadi salahsatu desa ynag sudah menjalankanya dengan cukup baik, dengan beberapa catatan sebagai acuan evaluasi di kemudian hari.

## BAB V

### **ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DESA NGROTO**

#### **A. Aspek Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Price dan Mylius (1991), Partisipasi berarti keterlibatan penerima manfaat dalam perencanaan, desain, implementasi dan pemeliharaan intervensi pembangunan selanjutnya. Ini berarti bahwa orang-orang dimobilisasi, mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini partisipasi warga dalam pengelolaan dan desa Konsep yang satu ini menekankan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga bukan hanya sekedar kepedulian kepada penerima derma atau kaum yang tersisih menuju kepedulian dengan beragam bentuk keikutsertaan warga dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan pada berbagai gelanggang kunci yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Adapun beberapa kegiatan yang menjadi wadah masyarakat untuk berpartisipasi diantaranya sebagai berikut;

##### **1) Musrenbangdes sebagai representasi atas bagian dari keterbukaan perencanaan pembangunan.**

Prosedur dan tingkatan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap lembaga tercapai tujuan yang maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tujuan mencapai proses pemerintahan yang baik. Prosedur pembangunan yang diawali dengan musyawarah dusun sehingga mendapatkan inti permasalahan yang disepakati bersama kemudian di sampaikan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang kemudian di tetapkan pada forum musyawarah penetapan. Setiap proses dimulai dengan perencanaan yang baik tujuannya untuk membuat kegiatan yang tepat sasaran sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tentukan. Seperti yang diungkapkan sekretaris BPD Bapak Abdurrozaq sebagai berikut:

...pelaksanaan musrenbangdes menjadi salahsatu media partisipasi masyarakat dalam menjalankan haknya sebagai masyarakat, tapi dalam pelaksanaan musrenbangdesa di desa Ngroto yang hadir adalah perwakilan dari tokoh masyarakat saja dikarenakan sebelum musrenbangdesa sudah ada musyawarah dusun yang dihadiri oleh mayoritas masyarakat dusun....

Penjelasan ini menjadi pengungkap bahwa pemerintah desa Ngroto tidak secara 100% selalu melibatkan masyarakat umum untuk diikut sertakan dalam proses pembangunan, hanya diawal saja ketika pelaksanaan musyawarah desa, dan selanjutnya musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes dan musyawarah penetapan hanya dihadiri perwakilan saja dari elemen masyarakat seperti, rt rw tokoh amsyarakat, karangtaruna dan lain sebagainya.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Ngroto tahun 2021 menggambarkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat, tetapi hanya sebatas diikutertakan dalam musyawarah dusun saja, ketika naik ketingkat musrenbangdes dan musyawarah penetapan hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat saja, seperti Ketua RT/RW tokoh masyarakat kaangtaruna, dan lain sebagainya. Dalam observasi lebih lanjut pada musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang desa, didapati penyortiran usulan pembangunan dari masyarakat dilihat dari keurgensiannya, seperti jika ada pembangunan untuk pendidikan akan didahulukan dari pembangunan talud, pembangunan irigasi persawahan akan didahulukan daripada pembangunan gapura dan lain sebagainya.

## **2) Tim pelaksana kegiatan (TPK) sebagai wadah partisipasi masyarakat desa Ngroto**

Untuk mengupayakan output kinerja yang maksimal, pemerintah desa harus mampu memaksimalkan proses daya tanggapnya terkait kebutuhan warga yang mana wajib bisa menampung setiap usulan dari setiap masalah yang membutuhkan peran pemerintah. Dalam hal Partisipasi, pengelolaan dana desa di desa Ngroto pada proses daya tanggap tim pelaksana terkait perencanaan pembangunan dana desa khususnya pada desa Ngroto tinggal melaksanakan juknis atau RAB yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa Ngroto selalu mewadahi saran dari warga terkait segala proses kegiatan dana desa, selalu merespon saran dan kritik dari warga dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetap berkoordinasi dengan pihak desa. Memberikan wadah dan memfasilitasi warga terkait pelaksanaan dana desa yang dijabarkan di atas, diharapkan bisa tercapainya tujuan-tujuan pembangunan misalnya yang dijabarkan Laksana dan Zakiyah (Laksana 2013) (Zakiyah 2018) bahwa tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam program-program pemerintah adanya partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah akan dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Seperti yang dikatakan skretaris BPD desa Ngroto bapak abdurrozaq sebagai berikut:

*...tim pelaksana pembangunan yang di bentuk pemerintah desa salahsatunya terdiri dari unsur masyarakat, biasanya diketuai oleh kepala dusun dan dianggotai oleh masyarakat diwilayah yang dijadikan objek pembangunan. Tim ini bertugas untuk mengatur dan mengelola dana anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, contohnya pada pembangunan talut/gorong-gorong pengerasan jalan dan lain sebagainya...*

Dari hasil observasi juga dapat diambil persamaan fenomena yang terjadi dengan apa yang di ungkapkan bapak abdurrozaq, didapati pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh TPK (tim pelaksana pembangunan). Pembangunan di alukan sepenuhnya dibawah tanggung jawab tpk, mulai dari

pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. TPK akan di ganti jika kinerja yang dilakukan buruk, tetapi jika TPK bekerja dengan baik akan di beri tanggungjawab lagi di pembangunan berikutnya, tinggal menyesuaikan wilayah yang dijadikan objek pembangunan.

**B. Banner infografi ApbDesa dan laporan pembangunan desa sebagai produk transparansi didesa Ngroto.**

Transparansi yang dilakukan pemerintah desa meliputi pelaksanaan musyawarah pertanggung jawaban pembangunan yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan. Forum ini di hadiri berbagai pihak/element masyarakat diantaranya pemdes, BPD, rt/rw, fkd, linmas karang taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. pelaporan semacam ini juga merupakan salahsatu mekanisme untuk mewujudkan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam sesi wawancara yang dilakukan bersama kaur keuangan desa bapak faiz menurunkan sebagai berikut:

*...pelaporan semacam ini kami lakukan untuk menghindari penafsiran negatif yang ada di masyarakat tentang transparansi yang dilakukan pemerintah desa. Dan juga sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk melakukannya. Setelah melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang juga menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan di desa Ngroto...*

Pemerintah desa Ngroto memiliki tujuan untuk memberikan layanan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas terhadap program yang dijalankan. Salah satunya dengan yang disampaikan bapak faiz diatas. Disisilain pentransparansian juga dilakukan dengan cara pemasangan banner informasi anggaran pendapatan dan belanja desa. seperti yang diungkapkan kaur perencanaan bapak aris sebagai berikut:



*...upaya transparansi yang dilakukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan salahsatunya memasang banner informasi pembangunan seperti jumlah anggaran, spesifikasi fasilitas yang dibangun, jumlah pekerja dan lain sebagainya...*

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menggambarkan bahwa pemerintah desa Ngroto berupaya memberikan transparansi terkait pembangunan persektor yang sedang dijalankan, seperti contoh pembangunan ruas jalan gorng-gorong, talut dan lain-lain. Pembuktian yang nyata ditemukannya berbagai banner pertanggungjawaban yang dipasang di beberapa titik desa seeperti perempatan dan lapangan olahraga. Dalam kegiatan observasi peneliti juag sempat ikut serta memasag beberapa informasi terkait pelaporan keuangan desa yang dipasang di berbagai titik perempatan jalan di desa Ngroto, salah satunya yang penulis pasang di RW 5 RT 3 kampung Bolawi sebelah timur madrasah diniyah yaspia.

### **C. Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.**

Berbicara mengenai akuntabilitas, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa indikator: (1). Bagaimana pelaksanaan rapat rencana serta rencana kegiatan dana desa diproses serta dilaporkan. (2). Bagaimana tim pelaksana terlibat dalam ikut serta melaksanakan penggunaan dana desa. (3). Bagaimana pelaksanaan serta realisasi dari dana desa yang telah di gunakan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan (Eko S Putra 2017).

Seperti yang telah di ungkapkan bapak aris ardianto sebagai kaur perencanaan Berdasarkan kriteria tersebut, dalam hal akuntabilitas, hasil wawancara penulis dengan aris ardiyanto menjelaskan bahwa adapun bentuk pertanggungjawaban atas dana di desa Ngroto adalah dengan memberikan laporan yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, hal itu dikarenakan untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah desa harus membuat laporan

awal yang tujuannya sebagai syarat dalam mencairkan dana desa yang nantinya akan di pergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan.

Pelaporan juga merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (asas akuntabilitas), planning pelaksanaan kegiatan desa yang akan direalisasikan, sebelumnya dilakukanlah musyawarah pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana nantinya akan disepakati sebagai sebuah aktivitas pada APBDes dimana proses keterlibatan semua aktivitas pembangunan didesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang mana menjadi bertanggung jawab kepala desa. Kemudian laporan pertanggung jawaban wajib sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

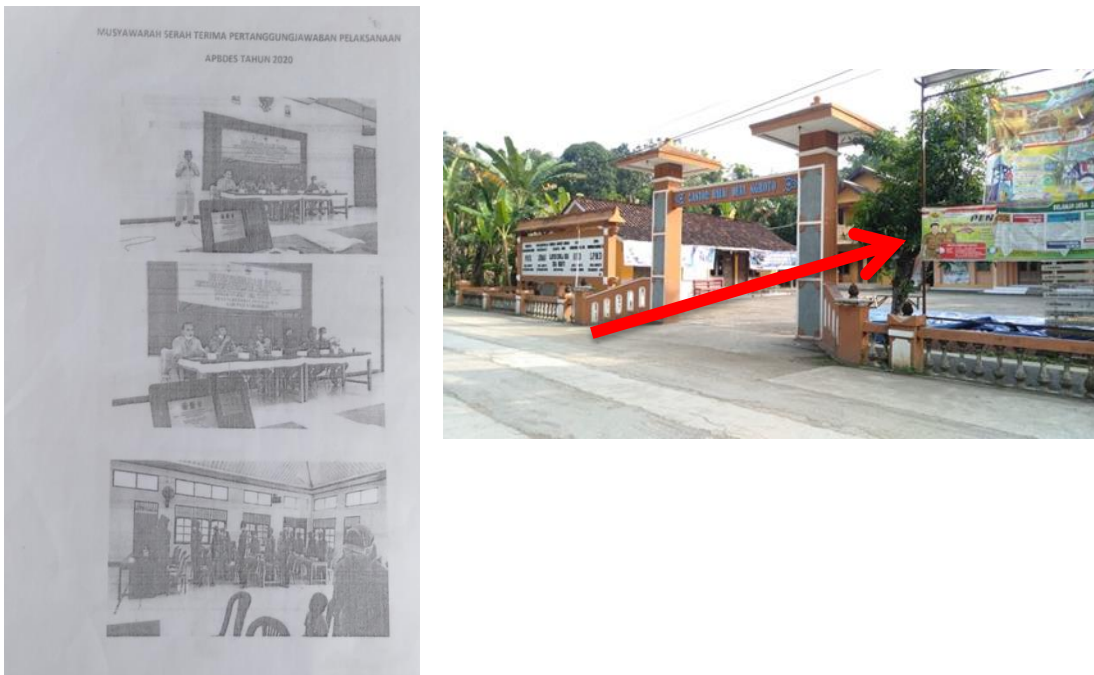
Hal yang sama di sampaikan oleh bapak rozaq dalam sesi wawancara tentang pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa terhadap proses pembangunan, sebagai berikut:

*...adanya forum pelaporan menjadi cara yang dilakukan sebagai upaya transparansi yang dilakukan pemerintah desa dan tpk untuk melaporkan hasil pembangunan serta perincian anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan. Dana yang digunakan setrta hasil infrastuktur yang terbangun harus menjadi perhatian husus dalam forum ini. alur pendanaan serta pengkroscekan laporan dengan fakta dilapangan dilakukan untuk menunjukkan validitas laporan...*

Peneliti juga melakukan observasi dilapangan untuk melihat pembangunan infrastuktur yang tertulis dalam perencanaan serta pelaporan yang menjadi data dokumen dari pemerintah desa. hasilnya peneliti menyimpulkan pelaksanaan pembangunan infrastuktur pada tahun 2020 berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi evaluasi yaitu

peng edukasian masyarakat akan perawatan fasilitas yang sudah di bangun serta pemanfaatan yang perlu ditingkatkan lagi, ini di sebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan tujuan pembangunan unit infrastuktur itu dilaksanakan, contohnya pembangunana saluran irigasi dan gorong-gorong; ditemukan masyarakat yang memanfaatkan saluran irigasi sebagai tempat perendaman kayu serta ditemukan gorong-gorong yang rusak akibat dilewati truk bermatan lebih yang seharusnya truk tersebut tidak diperbolehkan melewati jalan tersebut.

Gambar 1. 7 pemasanangan laporan apbDesa



Gambar 1. 8 rapat pelaporan pertanggungjawaban pembangunan



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian yang membahas mengenai “Konsep Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)”, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

##### **1. Dalam pelaksanaan pembangunan**

Pelaksanaan yang dilakukan secara terperinci dan terstruktur memberikan indikasi bahwa pemerintah desa telah bekerja dengan baik. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimulai dari pengumpulan aspirasi yang bersumber dari masyarakat dengan diwadahi musyawarah dusun yang dihadiri masyarakat dari masing-masing RT/RW, dengan adanya musyawarah dusun masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengumpulan aspirasi atau gagasan-gagasan pembangunan yang ingin dilakukan di desa Ngroto, terlebih-lebih yang ingin dilakukan di wilayah masing masing (RT/RW). Gagasan yang sudah terkumpul kemudian dibahas kembali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, BPD bersama pemerintah desa akan mengundang elemen-elemen masyarakat yang dibutuhkan dalam proses musyawarah berlangsung. Elemen masyarakat tersebut diantaranya ketua rt/rw, lpmd, karangtaruna, tokoh masyarakat/agama, babinsa/babin kamtibmas serta linmas desa ngroto. Dalam sisi pelaksanaan desa ngroto membentuk TPK (tim pelaksana kegiatan) yang didalamnya diketuai oleh kepala dusun dan di anggotai oleh elemen masyarakat yang lain sebagai bentuk upaya partisipasi dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

##### **2. implementasi prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi.**

Upaya yang dilakukan pemerintah desa ngroto dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menunjukkan hal yang positif diantaranya yang dilakukan pemerintah desa ngroto adalah pelaksanaan laporan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa ngroto. Laporan diaudit dalam forum musyawarah pelaporan hasil pembangunan desa

yang dihadiri oleh BPD (badan permusyawaratan desa). Sedangkan dalam pengimplementasian prinsip partisipasi adalah dengan adanya wadah seperti musdus, musrenbang, dan musyawarah penetapan. dalam kegiatan ini masyarakat dapat berpartisipasi sebagai peserta untuk memberikan sumbangsih fikiran serta gagasannya dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastuktur desa. dengan demikian prinsip partisipasi masyarakat sudah terpenuhi, dengan meninggalkan catatan bahwa partisipasi masyarakat secara utuh belum berjalan dengan baik dikarenakan dalam forum lebih tinggi unsur masrakat yang dapa mengikuti forum hanya sebatas perwakilan. Sedangkan pengejawentahan prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah desa ngroto dengsn memasang banner infografis anggaran pendapatan dan belanja desa serta pendistribusiannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada, salahsatunya yaitu banner yang dipasang untuk memberikan pentransparansian anggaran pembangunan infrastuktur desa ngroto.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai implikasi praktis dari pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jika satu tangan tidak dapat membuat tepukan maka pakailah dua tangan untuk membuat gemuruh, ini maksudnya adalah pemerintahan yang sehat dapat terlaksana jika berbagai sektor yang melandasinya dapat bekerja sama dengan baik. Untuk itu pemerintahan Desa Ngroto dalam menjalankan proses haruslah melibatkan sektor-sektor yang ada di dalam elemen masyarakat.
2. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya konsen diantara pemerintah dan warganya untuk memulai serta mengembangkan sektor-sektor yang ada didesa seperti ekonomi dan pendidikan.

Contoh disektor pendidikan seperti memfasilitasi lebih untuk anak-anak yang ingin mendapatkan bimbingan belajar, sedangkan disektor ekonomi mengoptimalkan kembali peran BUMDesa dengan menunjuk

orang-orang yang berkompeten untuk menjadi leader yang dapat memberikan sinergi baru bagi anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriadi, Rian. "Pelaksanaan Good Governance Pasca Pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat ( Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil )." *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2015: 5.
- Aminullah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Ilmiah Ikip Mataram*, 2016: 620.
- Anoraga, Pandji. *Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil*. Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- Arikunto, S. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta., 2002.
- Azizah, Rofsa Nur. *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara*. Lampung, 2017.
- Azmi. "Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan Mpr-Ri Perspektif Fiqh Siyāsh." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta, 2007.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Pt> Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Cresweel, J. W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pt Pustaka Belajar, 2010.
- Dian Prisma Safitri, Edison, Fitri Kurnianingsih. "Analisis Good Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah Serta Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Keterlibatan Non-Government Organization (Ngo) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)* 35, 2017: 35.
- Domai, Tjahjanulin. *Good Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Ginting, Gusrini Hagaina Br. "Politik Pembangunan Desa Studi Kasus Pembangunan Di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun 2018." (Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 2020: 2.



- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Handayani, Risma. "Pembangunan Masyarakat Pedesaan." *Alauddin University Press.*, 2014: 2.
- Haryanto, Amirul Hadi Dan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Untuk Iain Dan*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hayat, Hayat. *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Kamaluddin, Santrio. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang." *Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal*, 2019: 222.
- Kartasmita, Ginanjar. *Pembangunan Nutuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pt. Pustaka Cidesindo, 1995.
- Kustiawan, Kohen Sofi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintang Tahun 2014." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017: 12.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nurul Fitrah, Ahmad Mustanir Dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 2021: 339.
- Prasojo, Rizky Akbar. *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sdatigede Kecamatan Sedati Kabupaen Sidoarjo)*. Sidoarjo, 2015.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purwaningsih, Ernawati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Jantra*, 2008: 443-452.
- Rasyd Rida, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma. "Analisis Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Islam (Studi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)." *Jurnal Md*, 2016: 213.
- Rendra Setyadiharja, Dewi Kurniasih, Poppy Setiawati Nursnaeny, Neng Suryanti Nengsih. "Good Governance Vs Good Governance: A Comparative Theoretical Analysis." *Atlantis Press*, 2017: 92.

- Rosyid Ridla, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma. "Analisis Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Islam (Studi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) ." *Jurnal Md Uin Sunan Kalijaga*, 2016: 227.
- Sadikin. *Galeade. Wordpress.Com*. 03 9, 2017.  
<https://Galeade.Wordpress.Com/Author/Sadikinsfc/> (Accessed 6 7, 2022).
- Safitri, Dian Prima. "Analisis Good Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Keterlibatan Non-Government Organization (Ngo) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Pr." *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Umrah*, 2017: 35.
- Sari, Wilda. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Makassar, 2020.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Peneletian*. Jakarta: Mitra Wacana, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumodiningrat. *Pembangunanan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pt Bina Rena Pariwisata, 1997.
- Susanto, Nur Agus. "'Tirani' Konstitusional." *Jurnal Yudisial* , 2013: 284 - 303.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zaini, Faisal, Helmi. "Pembangunan Pedesaan." *Artikel*, 2014.
- Zainudin, Arif. "Model Kelembagaan Pemerintah Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 2016: 332.

## LAMPIRAN

### Lampiran i



#### **Data diri penulis**

Nama: Hakim Baihaqi

Jenis kelamin : laki-laki

Tempat tanggal lahir: Grobogan, 26 Agustus 2000

Alamat: Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Email: [hakimbaihaqi\\_1806016105@student.walisongo.ac.id](mailto:hakimbaihaqi_1806016105@student.walisongo.ac.id)

Nomor hp: 085711771585

#### **Riwayat pendidikan formal**

TK pertiwi Desa Ngroto

SD Negeri 03 Ngroto

MTs Yaspia Ngroto

MA Yaspia Ngroto

UIN Walisongo Semarang

#### **Riwayat pendidikan non formal**

Madin Yaspia Ngroto

#### **Pengalaman organisasi**

Pramuka penggalang 2015

Pramuka penegak 2018

Ketua OSIM MA yaspia Ngroto 2017

Pengurus Biro Keagamaan Pmii Rayon Fisip 2019

Kordinator Biro Keagamaan Pmii Rayon Fisip 2020

Staff devisi napsa UKM U An-niswa UIN Walisongo Semarang 2019

Ketua UKM U An-niswa UIN Walisongo Semarang 2021

Tim konselor pik-ma anniswa UIN Walisongo Semarang 2021

Lampiran ii

Dokumentasi wawancara



Wawancara kadus



wawancara sekertaris bpd



Kaur keuangan



kaur perencanaan



Masyarakat



tokoh masyarakat/moden



Masyarakat



masyarakat



masyarakat

